



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Cidadap selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Cidadap Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Cidadap Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **1.2 Gambaran Umum Kecamatan**

Kecamatan Cidadap merupakan salah satu bagian wilayah utara Kota Bandung dengan memiliki luas lahan sebesar 612, 316 Ha. Secara administratif Kecamatan Cidadap dibatasi oleh :

- Bagian Selatan :Kecamatan Sukajadi
- Bagian Utara :Kecamatan Lembang Kab. Bandung
- Bagian Timur :Kecamatan Sukasari dan Kec. Sukajadi
- Bagian Barat :Kecamatan Coblong

Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Cidadap meliputi 3 (Tiga) Kelurahan yaitu *Kelurahan Hegarmanah, Kelurahan Ciumbuleuit, dan Kelurahan Ledeng*. Secara geografis Kecamatan Cidadap memiliki bentuk wilayah datar / berombak sebesar 60 % dari total keseluruhan luas wilayah. Ditinjau dari sudut ketinggian tanah, Kecamatan Cidadap berada pada ketinggian 750 m diatas permukaan air laut. Suhu maksimum dan minimum di Kecamatan Cidadap berkisar 28 ° C-19 ° C, sedangkan dilihat dari segi hujan berkisar 1000 mm/th dan jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak sebesar 188 hari.

### 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 tentang (SOTK SKPD) Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung , Kecamatan mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

### 1.4 Isu Strategis

Pemerintah Kecamatan Cidadap Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi

lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Cidadap Kota Bandung pada tahun 2014 - 2018 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- 5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RT RW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cidadap Kota Bandung, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah

Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Pemerintah Kecamatan Cidadap Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

### **1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Penataan Organisasi Manajemen Publik (Pelayanan Publik)**

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah membangun sistem dan budaya pelayanan publik yang prima.

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan

layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

## 2. Janji Walikota dan Wakil Walikota terpilih

Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung 2013 - 2018 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut

Tabel 1.2

### Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

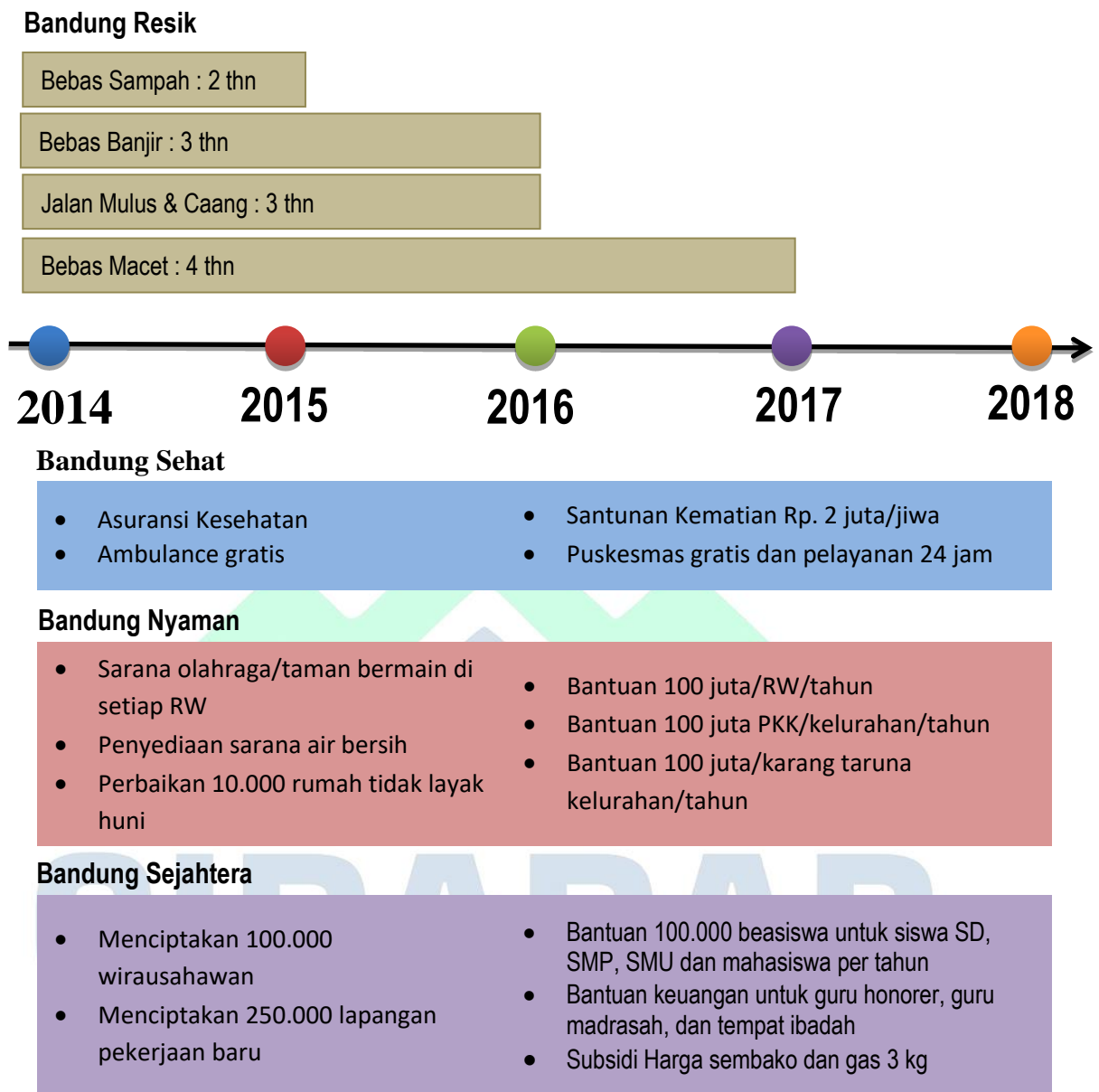
No.	Aspek	Indikator
1	<b>BANDUNG SEHAT</b>	Asuransi Kesehatan <i>Ambulance</i> gratis Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam
2	<b>BANDUNG RESIK</b>	Bebas Sampah dalam 2 Tahun Bebas Banjir dalam 3 Tahun Jalan Mulus dan Caang dalam 3 Tahun Bebas Macet dalam 4 Tahun
3	<b>BANDUNG NYAMAN</b>	Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW Penyediaan sarana air bersih Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni Bantuan 100 juta/RW/tahun

No.	Aspek	Indikator
		Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun
4	<b>BANDUNG SEJAHTERA</b>	Menciptakan 100.000 wirausahawan Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg



Gambar 3.1

### Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih



Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013

#### 1.5 Landasan Hukum

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.

## **1.6 Sistematika**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2018 adalah :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

### **BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **2.1. Perencanaan Strategis**

##### **2.1.1 Rencana Strategis Sebelum Revisi**

Rencana Strategis Kecamatan Cidadap Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Cidadap Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Cidadap Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Cidadap Kota Bandung Nomor 800/026 – Cddp/2013 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2013-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Cidadap Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Cidadap Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018.

Penyusunan Renstra Kecamatan Cidadap Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat

dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Cidadap Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Cidadap Kota Bandung dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Cidadap Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cidadap Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Cidadap Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## 1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Cidadap Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, "Bandung Juara".

Visi Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2018-2018 sesuai dengan **Revisi Renstra Kecamatan Cidadap** adalah :

**"Terwujudnya Kecamatan Cidadap yang Cerdas, Sehat, Sejahtera, dan Asri"**

## 1. Misi

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Kecamatan Cidadap mempunyai Misi sebagai Berikut :

1. Mewujudkan Pelayanan Publik yang **MANTAP** ( Melayani, Integritas, Professional )
2. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan

## 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan

mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Tabel 2.1  
**TUJUAN**

Misi	Tujuan
Mewujudkan Pelayanan Publik yang <b>MANTAP</b> ( Melayani, Integritas, Professional )	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayan Publik di Kecamatan dengan Membangun Sistem dan Budaya Pelayan Publik yang <b>MANTAP</b> ( Melayani, Integritas, Professional )
Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Adapun untuk indikator Tujuan nya adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayan Publik di Kecamatan dengan Membangun Sistem dan Budaya Pelayanan Publik yang MANTAP** ( Melayani, Integritas, Professional )

indikator dari tujuan 1 ini adalah :

- b. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat
- c. Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik
- d. Prosentase RW Juara
- e. Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif

3. **Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**

- a. Nilai Evaluasi AKIP

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2013 - 2018 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Sasaran dari tujuan 1
a. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
b. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan.

## Sasaran dari tujuan 2

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.

### 2.1.2 Rencana Strategis Setelah Revisi

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

**Dengan adanya revisi RPJMD maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cidadap setelah Revisi menjadi berikut**

#### MISI

MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG **MANTAP**  
(MELAYANI, INTEGRITAS DAN PROFESIONAL)

#### TUJUAN

Membangun Sistem dan Budaya Pelayanan Publik yang **MANTAP (Melayani, Integritas dan Profesional)**

Sasaran dari tujuan setelah Revisi RPJMD di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. **Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**
2. **Meningkatnya pemberdayaan masyarakat**

**Tabel 2.2**  
**Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Cidadak**  
**Setelah Revisi RPJMD**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
Membangun Sistem dan Budaya Pelayanan Publik yang MANTAP (Melayani, Integritas dan Profesional)	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana / instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Cidadak Kota Bandung setelah Revisi Renstra adalah sebanyak 2 (Dua) indikator sedangkan setelah Revisi RPJMD Indikator pada masing masing untuk menunjukkan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Kecamatan Cidadak Kota Bandung Setelah Revisi RPJMD**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2013 - 2018 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan revisi RPJMD terhadap Indikator Kinerja, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan Revisi dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil revisi tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cidadap Tahun 2018.

Hasil revisi pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain berkurangnya jumlah indikator juga merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Cidadap Tahun 2013 - 2018.

1. Rekomendasi Bappeda Kota Bandung

- Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus masing-masing.
- Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk dihapus.

2. Rekomendasi Narsumber Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang dapat menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
- Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan
- Kriteria indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif perlu ditambah kriteria yang lainnya
- Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja

- Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing-masing kepala seksi dan Lurah dengan penghitungan bobot dari masing-masing capaian kinerja.

Berdasarkan hasil revisi dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Kecamatan tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :





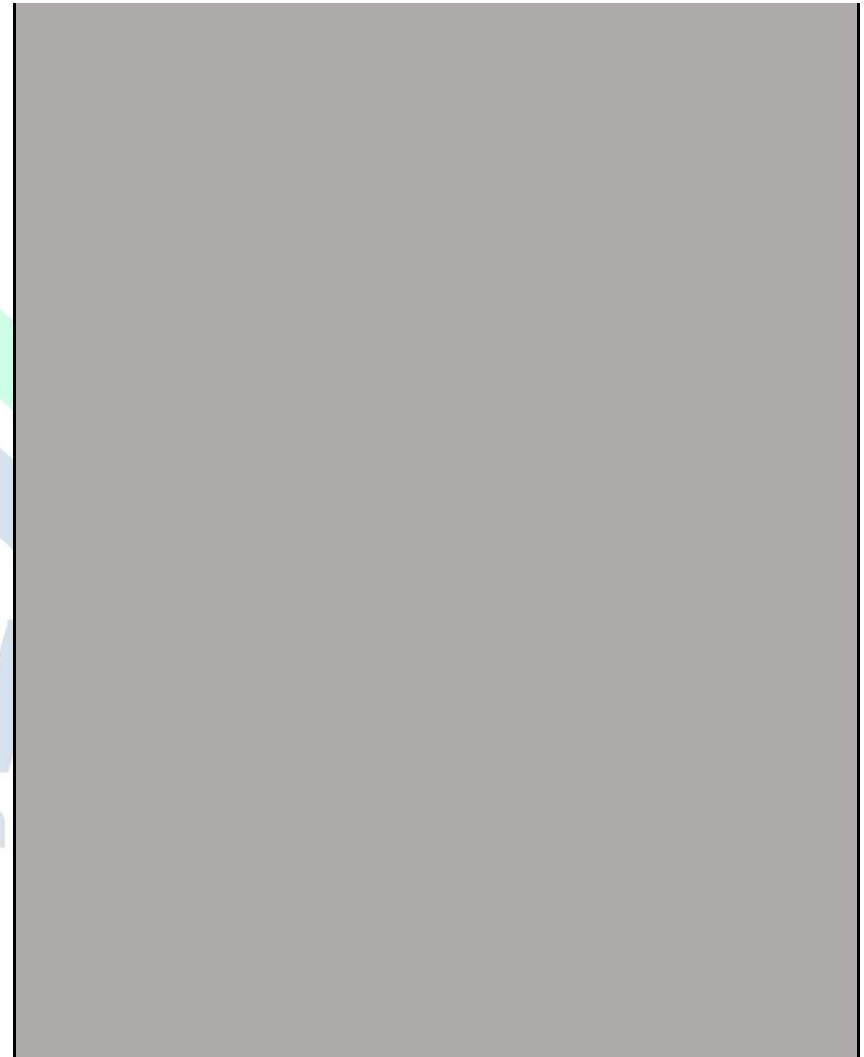
**Tabel 4.4**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja sebelum revisi dan setelah revisi Renstra**  
**Kecamatan Cidadap Kota Bandung**

NO	TUJUAN	SASARAN	SEBELUM REVISI	SEBELUM REVISI					TUJUAN	SASARAN	SETELAH REVISI								
			INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN						
						2014	2015	2016					2018	2018	2014	2015	2016	2018	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21
1.	<b>Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamatan dan Kelurahan</b>	1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamatan dan Kelurahan	1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	77	78	<b>79</b>	80.5	83	<b>Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamatan dan Kelurahan</b>	1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai				80	81.75





				1. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	60	75	<b>80</b>	85	90
		2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	2. Capaian Kinerja TUP Kecamatan: Bidang pemerintahan, perekonomian, Pembangunan, Lingkungan Hidup, Pendidikan dan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta pelayanan	2. Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu	%	60	75	<b>80</b>	85	90
				3. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik	%	25	50	<b>75</b>	100	100





				4. Persen tase RW Juara	%	13,7 9	20,6 8	<b>31,03</b>	44,8 2	58,6 2	
				5. Persen tase Lembaga kemasyarakan Aktif	%	53,3 3	66,6 6	<b>80</b>	93,3 3	100	
				6. Rasio Anggota Linmas	Rasio	1,2: 1	1,3: 1	<b>1,5: 1</b>	1,6: 1	1,8: 1	
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan	3. Nilai AKIP Kecamatan	1. Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	50	60	<b>70</b>	75,1	78	
			4. Prosen tase temuan BPK/Inspektoral yang ditindaklanjuti	2. Persen tase temuan BPK/Inspektoral yang ditindaklanjuti	%	100	100	<b>100</b>	100	100	



### 1.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Cidadap

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kecamatan Cidadap Kota Bandung mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan disusun program-program pembangunan. Berdasarkan pada Peraturan Walikota Bandung No. 542/2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan, Kecamatan Cidadap melaksanakan beberapa Program, diantaranya

1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Inovasi Pembangunan Pemberdayaan Kewilayahan
5. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

Program yang disajikan di dalam LKIP adalah **Program Inovasi Pembangunan Pemberdayaan Kewilayahan** dan **Program peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan** saja, dimana penyusunan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan alur atau mekanisme perencanaan mulai dari MUSRENBANG hingga penetapan skala

prioritas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

### 1.1.3 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 050/Kep.966-Orpad/2013 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung 2013-2018. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Bersamaan dengan reviu rencana strategis Kecamatan juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cidadap adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.5

### Tabel Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cidadap 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Angka	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sesuai amanat UU no.25/2009 tentang pelayanan publik dan PP 19/2008 tentang kecamatan maka kecamatan sebagai lembaga pelayanan publik berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui pengukuran kepuasan pelayanan dimana masyarakat yang dimaksud adalah warga masyarakat kecamatan	Sesuai dengan SK Menpan No.16 Tahun 2014 tentang survey kepuasan masyarakat dan SK Menpan No. 25/2004  <b>Rata Rata IKM Kecamatan dan Kelurahan</b>	Responden adalah penerima pelayanan publik kecamatan dan kelurahan pada tahun pengukuran.  Responden secara acak berstrata mewakili jumlah kelurahan dan jenis pelayanan di lingkungan kecamatan
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	Pemberdayaan Masyarakat menjadi Tupoksi Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 1407 Tahun 2016 tentang (SOTK SKPD) dan menjadi IKU Karena tercantum dalam Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Mengenai Program PIPPK	<b>% Rata rata RW JUARA + LKK JUARA dan SISKAMLING AKTIF</b>	Sesuai Kriteria RW Juara, Kriteria LKK Aktif dan Kriteria Siskamling Aktif

#### 2.1.3 Rencana Kinerja 2018

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2014-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana



Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018, Kecamatan Cidadap Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.6

**Perjanjian Kinerja Kecamatan Cidadap Kota Bandung  
Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	81.75
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	77.50

Adapun Bila dilihat Rencana Kinerja Tahunan 2018-2018 Kecamatan Cidadap Setelah dilakukannya Revisi RENSTRA Kecamatan sebagai konsekuensi adanya perubahan RPJMD Kota Bandung menjadi Sebagai Berikut :

Tabel 2.7

**Rencana Kinerja tahunan 2018- 2018  
Kecamatan Cidadap hasil Revisi Renstra**

TUJUAN	SASARAN	SETELAH REVISI						
		INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2014	2015	2016	2018	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai				80.5	81.75

	<b>Meningkatnya pemberdayaan masyarakat</b>	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%				<b>75</b>	77,5

#### 2.1.4 Perjanjian Kinerja 2018

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Revisi Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2018-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018. Kecamatan Cidadap Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.7  
Kecamatan Cidadap Kota Bandung

#### Perjanjian Kinerja Hasil Revisi

#### Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAR-GET	RENCANA ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	<b>Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamatan dan Kelurahan</b>	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	<b>81.75</b>	<b>4.085.559.127</b>
	<b>Meningkatnya pemberdayaan masyarakat</b>	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	<b>77.5</b>	<b>2.361.876.863</b>

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Kecamatan Cidadap Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cidadap Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Cidadap.

#### 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 3.1

**Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Cidadap  
Kota Bandung Tahun 2018**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Dark Blue
2	Baik	75.00 – 89.99	Light Blue
3	Cukup	65.00 – 74.99	Green
4	Kurang	50.00 – 64.99	Light Green
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Red

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Cidadap Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2018-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2016 hasil revidi dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Walikota Bandung **Nomor : -Bag.Orpad/2018**, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

### 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Cidadap Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Kecamatan Cidadap Melalui **Keputusan Camat Cidadap Kota Bandung Nomor : 050/Kep.007-Kec.Cddp/2018** tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Cidadap Kota Bandung

juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Cidadap Kota Bandung tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2

**Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cidadap  
Kota Bandung Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Angka	81.75	81.97	100.97
2	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	77.5	77.92	100.54

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan, dengan capaian kinerja **100.97 %**, pada indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, dengan capaian kinerja **100.54 %**.

### **3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Secara umum Kecamatan Cidadap Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Revisi 2018-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2014-2018 sebanyak 2 sasaran.

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Cidadap, dari sebanyak 2 sasaran strategis dengan sebanyak 2

indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Cidadap Kota Bandung adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Angka	81.75	81.97	100.97
	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	77.5	77.92	102.54

Untuk melihat progress kinerja capaian Sasaran Strategis dan IKU Kecamatan Cidadap per Triwulan dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 3.4**  
**Capaian Indikator Kinerja per Triwulan**  
**Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2018**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan	
a	B	c	D	e	f	g	h	i	j	k
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	1.1	Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Angka	81.75	Triwulan 1	81.75	81.97	100.97	
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	1.1	Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Angka	81.75	Triwulan 1	81.75			
						Triwulan 2	81.75	81.77		
						Triwulan 3	81.75	81.85		
						Triwulan 4	81.75	81.97		
						<b>Kondisi Akhir (F)</b>		<b>81.97</b>	<b>100.97</b>	
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	2.1	Tingkat Pemberdayaan Lembaga	%	77.5	Triwulan 1	-	-	n/a	
						Triwulan	-	-	n/a	

			Kemasyarakatan		2			
					Triwulan			
					3	-	-	n/a
					Triwulan			
					4	77.5	77.92	100.54
					<b>Kondisi Akhir (F)</b>	<b>76.91</b>	<b>77.92</b>	<b>100.54</b>

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

**Tabel 3.5**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	>100 %
2	Sesuai Target	100 %
3	Tidak Mencapai Target	< 100 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 2 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Pencapaian target Misi**

No.	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	2	2	100,00	0	0	0	0
	Jumlah	2	2	100,00	0	0	0	0



Dari sebanyak 2 sasaran dengan sebanyak 2 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Cidadap Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Kategori Pencapaian Indikator Sasaran**

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	TINGKAT PENCAPAIAN					
			MELAMPAUI TARGET (>100%)		SESUAI TARGET (=100%)		BELUM MENCAPAI TARGET (>100%)	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	<b>Sasaran 1</b> Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Cidadap	1	1	100.97	0	0	0	0
2.	<b>Sasaran 2</b> Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	1	1	100.54	0	0	0	0

Dari tabel diatas jika dihitung rata-rata maka capaian Misi 1 adalah sebesar **100.97 %** yang berarti telah melebihi target yang telah ditetapkan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Secara umum Kecamatan Cidadap Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Renstra 2013-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 3 ( tiga ) sasaran.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Revisi Kecamatan Cidadap Kota Bandung tahun 2018-2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

### Sasaran 1

#### Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan public

Pencapaian sasaran ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8

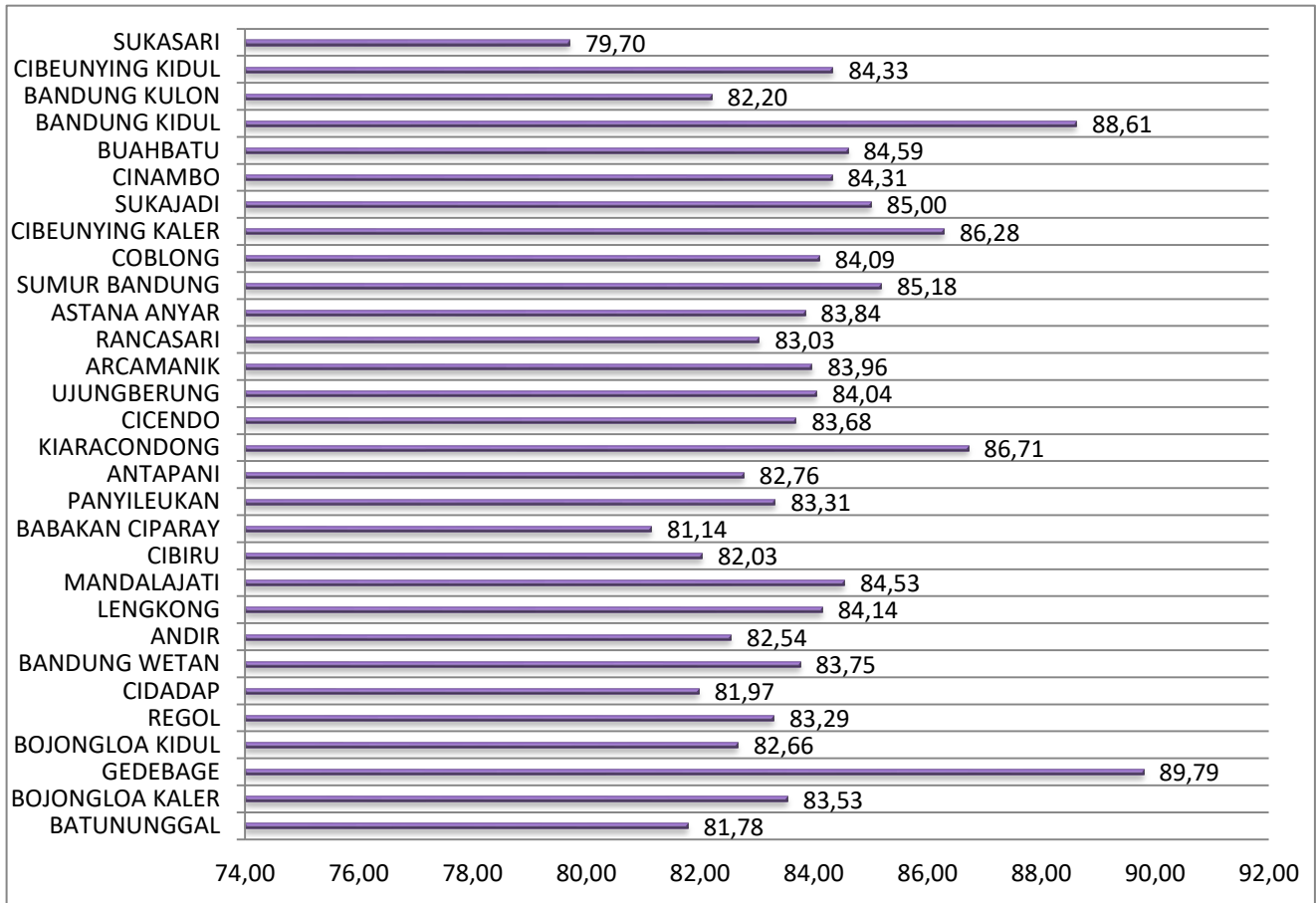
#### Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	81.75	81.97	<b>100.97</b>	82	%
Rata-rata Capaian Kinerja					100.87		103,45

Capaian kinerja nyata indikator ***Rata rata Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 81.97*** bila dibandingkan dengan Kecamatan lainnya di Kota Bandung adalah sebagai berikut.

Grafik 3.1

**Grafik Perbandingan Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Kecamatan Lainnya di Kota Bandung**



Sumber : <http://lakip.bandung.go.id>

Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Cidadap sudah cukup dibandingkan dengan Kecamatan lainnya. tetapi masih dibawah nilai IKM yang tertinggi diperoleh oleh Kecamatan Gedebage dengan Capaian 89.79 sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Sukasari dengan Capaian 79.7. Kecamatan Cidadap sendiri memperoleh rata rata IKM sebesar 81.97 jika dibandingkan dengan Kecamatan lain yang juga terdiri dari 4 (empat) Kelurahan seperti Kecamatan Mandalajati, Kecamatan Panyileukan dan Kecamatan Bandung Wetan, maka Kecamatan Cidadap masih dibawah dalam rata rata IKM karena kondisi kantor ruang pelayanan di kelurahan yang relatif kurang representatif. Kondisi kantor Kelurahan dan Ruang pelayanan dinilai kurang representatif dibandingkan dengan kecamatan. Sedangkan untuk mengetahui pencapaian sasaran ini selama 4 (empat) tahun Pelaksanaan RESNTRA, dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.9  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1**  
**Meningkatnya kualitas pelayanan publik Selama 4 Tahun**  
**Pelaksanaan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016		%	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Targe	Realisasi	
			et	asi	et	asi	et	asi	t	asi				
1	Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Angka	-		0.00	-		0.00	80.5	81.2	100.86	81.75	81.97	<b>100.97</b>

Sasaran Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan" adalah sebesar **81.97** dari target sebesar **81.75** yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kerjanya adalah **100.97 %**, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Dari 2 (dua) tabel diatas dapat terlihat bahwa capaian tahun 2018 telah melebihi target akhir Resntra pada tahun 2018 yaitu sebesar **81.97** sehingga persentase kerjanya terhadap Target akhir Renstra sebesar **100.87%**. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebelumnya akan di gambarkan pada tabel terpisah, karena pada tahun 2014-2017 Indikator Kinerja yang menjadi IKU adalah Indeks Kepuasan Masyarakat hanya untuk Kecamatan saja dan baru diperhitungkan rata-rata Kecamatan dan Kelurahan baru pada tahun 2017.

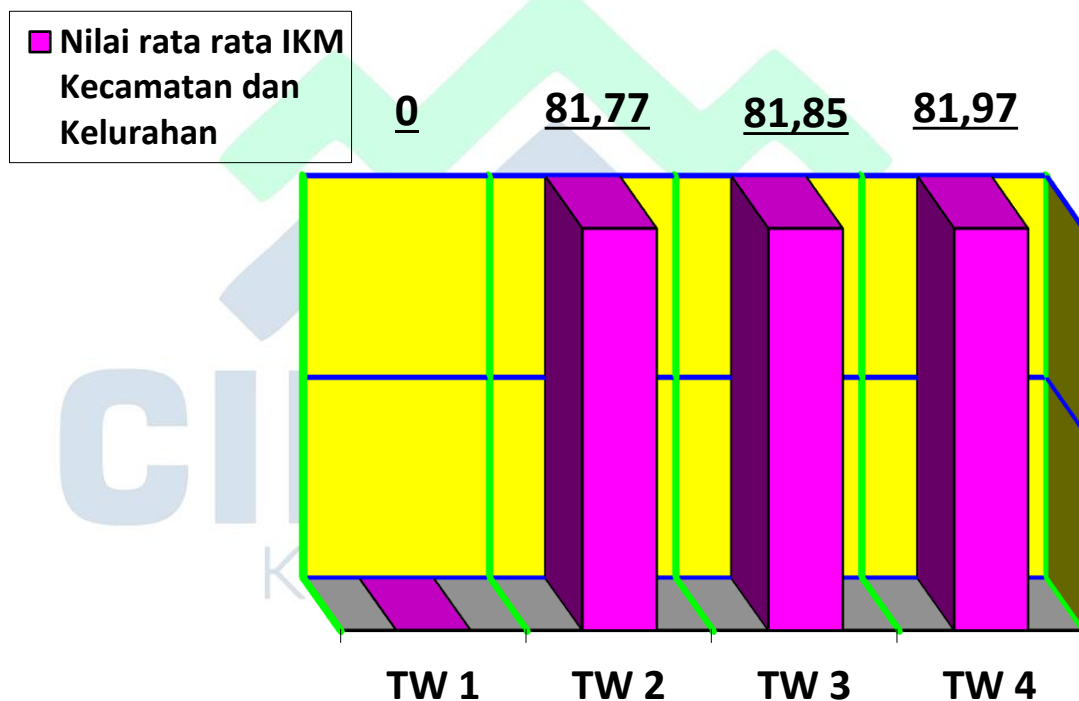
### **Analisis Capaian Indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat**

Capaian kinerja nyata indikator **Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat** apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya selalu mengalami peningkatan. Walaupun pada tahun 2014-2017 Indeks

Kepuasan Masyarakat hanya memperhitungkan IKM Kecamatan saja dan baru pada tahun 2018 capaian indikator Indeks Kepuasan masyarakat ini dilakukan perhitungan secara menyeluruh Kecamatan dan tiga Kelurahan dan di hitung rata-rata IKM nya.

Data penunjang capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari sekretariat Kecamatan Cidadak dan Kepala Seksi Pelayanan. Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat secara mandiri oleh Tim yang dibentuk oleh Surat Keputusan Camat Cidadak yang dilakukan tiap triwulan pada tahun 2018.

Grafik 3.2

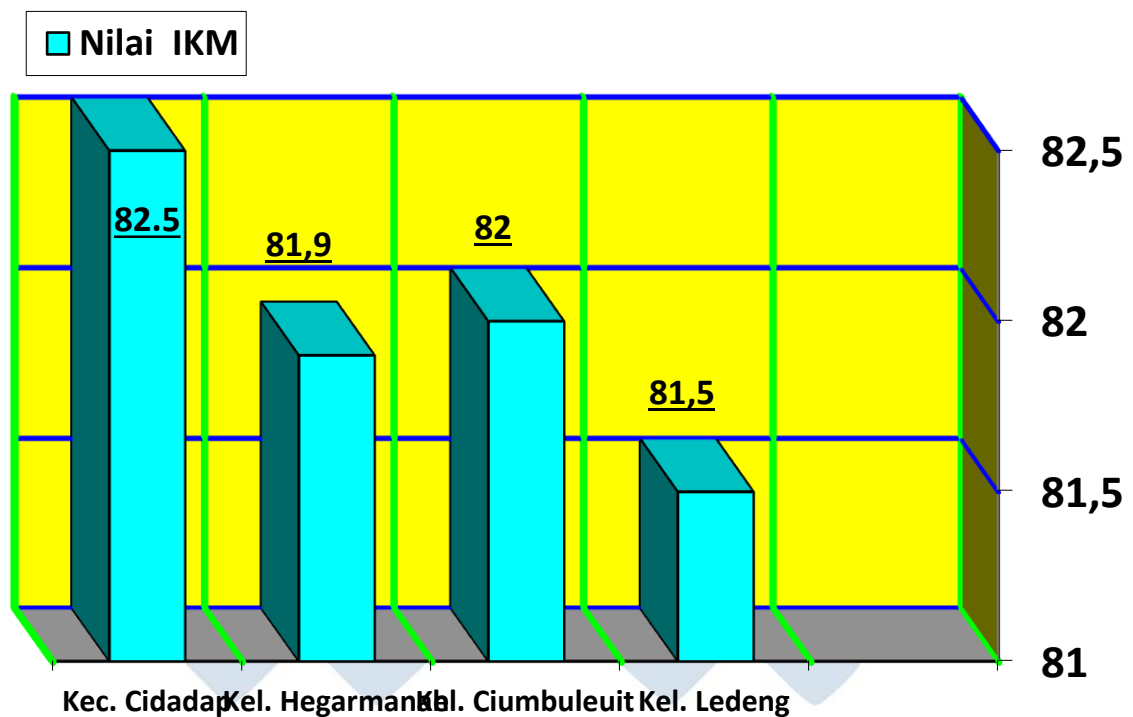
**Grafik perkembangan Nilai IKM tiap Triwulan pada Tahun 2018**

Nilai IKM yang tinggi tersebut ada tahun 2018 ini adalah karena dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan kami membuat motto dalam melakukan Pelayanan Kepada Masyarakat Untuk meningkatkan Mutu Pelayanan Publik yaitu **MANTAP (Melayani, Integritas dan Profesional)** dan motto tersebut menjadikan budaya kerja bagi para petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan publik.

Sedangkan untuk melihat capaian IKM yang tertinggi di Kecamatan Cidadap diantara Kecamatan dan Kelurahan dapat dilihat pada Grafik berikut ini.

Grafik 3.3

**Grafik perbandingan Nilai IKM Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2018 Di Kecamatan Cidadap**



Dari Grafik diatas capaian Nilai IKM yang terbesar di Kecamatan Cidadap adalah capaian IKM Kecamatan Cidadap dengan capaian sebesar 82.5 dan yang terendah adalah capaian IKM Kelurahan Ledeng dengan Nilai 81.5. Hal tersebut membuktikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Cidadap lebih baik dari pelayanan yang dilakukan oleh petugas pelayanan dari Kelurahan. Capaian yang diraih oleh Kelurahan lebih rendah dibandingkan dengan Kecamatan disebabkan karena jumlah SDM yang terbatas serta pelayanan yang diberikan oleh Kelurahan lebih banyak dari segi kuantitasnya dan perlu adanya pengecekan ulang dengan teliti oleh petugas pelayanan di Kelurahan karena beberapa produk yang dihasilkan dari pelayanan yang diberikan oleh Kelurahan memerlukan penelitian yang lebih lanjut karena bias bersinggungan dengan hukum yaitu seperti Domisili Perusahaan, Keterangan Ahli Waris dan bidang pertanahan. Selain itu ada pula anggapan bahwa KTP dan Kartu keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil msih dianggap oleh sebagian besar

masyarakat adalah produk dari Kecamatan sehingga kecepatan penerbitan dan keakuratannya dianggap masih menjadi tanggung jawab Kecamatan dan Kelurahan.

Capaian Kinerja nilai IKM ini telah melampaui target minimal yang menjadi standar Kota Bandung yang terdapat dalam RPJMD Kota Bandung yaitu, indikator Persentase SKPD dengan nilai IKM "Baik" diukur berdasarkan jumlah SKPD yang melakukan survey kepuasan masyarakat dengan hasil di atas 75,00. Capaian yang diperoleh oleh Kecamatan Cidadap sudah melampaui target minimal yang menjadi ukuran IKM Kota Bandung.

Capaian kinerja sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan masyarakat didukung oleh Program :

No.	PROGRAM	URAIAN/ PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
1.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (program penunjang)</b>	<b>Output</b> dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah tersedianya (jasa komunikasi, sumber daya air, kebutuhan listrik dan internet), jasa kebersihan kantor, jasa perbaikan peralatan kerja, Alat Tulis Kantor (ATK), barang cetakan dan penggandaan, peralatan dan perlengkapan kantor, Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, makanan dan minuman dan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (program penunjang)</b>	<b>Output</b> dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya Gedung Kantor yang memadai, Kendaraan dinas operasional yang memadai, Terpeliharanya gedung kantor dan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
3.	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur (program penunjang)</b>	<b>Output</b> dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya Pakaian Dinas Lengkap beserta atribut, Tersedianya pakaian batik dan pakaian olahraga
4.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (program penunjang)</b>	<b>Output</b> dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Meningkatnya kinerja pegawai kecamatan Cidadap dengan terlaksananya kegiatan pembinaan kinerja aparatur

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11

**Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran Pertama  
"Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik"**

Kode Rekening	Program / Kegiatan	ANGGARAN		
			TOTAL	%
2.07 . 4.05.08.02 . 22	<b>Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan</b>	927.219.709,00	543.309.715,00	58,60
2.07 . 4.05.08.02 . 22.01	Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW	679.347.959,00	295.813.465,00	43,54
2.07 . 4.05.08.02 . 22.02	Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK	73.277.250,00	72.902.250,00	99,49
2.07 . 4.05.08.02 . 22.03	Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	91.020.000,00	91.020.000,00	100,00
2.07 . 4.05.08.02 . 22.04	Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM	83.574.500,00	83.574.000,00	100,00
2.07 . 4.05.08.03 . 22	<b>Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan</b>	830.868.100,77	789.006.113,00	94,96
2.07 . 4.05.08.03 . 22.01	Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW	625.301.700,77	587.626.011,00	93,97
2.07 . 4.05.08.03 . 22.02	Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK	67.331.500,00	66.430.107,00	98,66
2.07 . 4.05.08.03 . 22.03	Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	85.292.900,00	82.221.095,00	96,40
2.07 . 4.05.08.03 . 22.04	Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM	52.942.000,00	52.728.900,00	99,60
2.07 . 4.05.08.04 . 22	<b>Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan</b>	603.789.052,92	506.685.385,00	83,92
2.07 . 4.05.08.04 . 22.01	Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW	365.383.052,92	273.114.385,00	74,75
2.07 . 4.05.08.04 . 22.02	Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK	62.322.000,00	62.322.000,00	100,00
2.07 . 4.05.08.04 . 22.03	Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	82.528.000,00	78.291.000,00	94,87
2.07 . 4.05.08.04 . 22.04	Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM	93.556.000,00	92.958.000,00	99,36
<b>4.05 . 4.05.08.01 . 01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>783.598.919,00</b>	<b>697.763.206,00</b>	<b>89,05</b>
4.05 . 4.05.08.01 . 01.02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.067.680,00	60.385.263,00	60,95
4.05 . 4.05.08.01 . 01.06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	10.554.200,00	6.907.700,00	65,45
4.05 . 4.05.08.01 . 01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	111.000.000,00	110.524.500,00	99,57
4.05 . 4.05.08.01 . 01.09	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	18.850.000,00	9.325.000,00	49,47
4.05 . 4.05.08.01 . 01.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.271.106,00	25.103.606,00	99,34
4.05 . 4.05.08.01 . 01.11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.228.200,00	9.451.637,00	84,18
4.05 . 4.05.08.01 . 01.12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.555.233,00	3.501.000,00	98,47
4.05 . 4.05.08.01 . 01.14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.582.000,00	6.400.200,00	47,12
4.05 . 4.05.08.01 . 01.15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.876.000,00	5.616.000,00	81,68
4.05 . 4.05.08.01 . 01.17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	25.914.500,00	25.749.300,00	99,36
4.05 . 4.05.08.01 . 01.18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	97.900.000,00	97.599.000,00	99,69
4.05 . 4.05.08.01 . 01.19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	270.100.000,00	270.000.000,00	99,96
4.05 . 4.05.08.01 . 01.20	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	67.700.000,00	67.200.000,00	99,26
4.05 . 4.05.08.01 . 01.22	Penyediaan Jasa Media Cetak dan Teknologi Informasi	22.000.000,00	0,00	0,00
4.05 . 4.05.08.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	639.586.721,00	541.988.480,00	84,74
4.05 . 4.05.08.01 . 02.22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	35.278.921,00	29.918.680,00	84,81
4.05 . 4.05.08.01 . 02.24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	540.730.000,00	482.979.800,00	89,32
4.05 . 4.05.08.01 . 02.45	Pembangunan sistem pelayanan dan database terpadu	63.577.800,00	29.090.000,00	45,75
4.05 . 4.05.08.01 . 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	142.273.450,00	127.721.000,00	89,77
4.05 . 4.05.08.01 . 28	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	1.568.297.962,00	1.194.338.332,00	76,16
4.05 . 4.05.08.01 . 28.01	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	35.488.052,00	33.629.212,00	94,76
4.05 . 4.05.08.01 . 28.03	Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	252.065.360,00	131.170.300,00	52,04
4.05 . 4.05.08.01 . 28.04	Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	696.212.100,00	575.764.370,00	82,70
4.05 . 4.05.08.01 . 28.05	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan	87.665.000,00	67.758.400,00	77,29
4.05 . 4.05.08.01 . 28.07	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	27.218.000,00	13.648.500,00	50,15
4.05 . 4.05.08.01 . 28.09	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	314.506.150,00	283.515.300,00	90,15
4.05 . 4.05.08.01 . 28.10	Kegiatan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat	155.143.300,00	88.852.250,00	57,27



4.05 . 4.05.08.02 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	93.523.864,00	72.015.237,00	77,00
4.05 . 4.05.08.02 . 01.06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1.487.550,00	1.300.000,00	87,39
4.05 . 4.05.08.02 . 01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	37.200.000,00	34.150.000,00	91,80
4.05 . 4.05.08.02 . 01.09	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
4.05 . 4.05.08.02 . 01.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	7.845.049,00	5.189.553,00	66,15
4.05 . 4.05.08.02 . 01.11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.837.930,00	2.759.630,00	97,24
4.05 . 4.05.08.02 . 01.12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	764.775,00	764.198,00	99,92
4.05 . 4.05.08.02 . 01.14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.037.000,00	1.037.000,00	50,91
4.05 . 4.05.08.02 . 01.15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.016.000,00	810.000,00	40,18
4.05 . 4.05.08.02 . 01.17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	3.995.000,00	3.995.000,00	100,00
4.05 . 4.05.08.02 . 01.02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.840.560,00	15.509.856,00	53,78
4.05 . 4.05.08.02 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	80.386.800,00	74.888.000,00	93,16
4.05 . 4.05.08.02 . 02.07	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	42.589.200,00	37.862.000,00	88,90
4.05 . 4.05.08.02 . 02.22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	37.797.600,00	37.026.000,00	97,96
4.05 . 4.05.08.02 . 28	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	994.362.119,00	851.980.239,00	85,68
4.05 . 4.05.08.02 . 28.01	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	21.520.000,00	21.520.000,00	100,00
4.05 . 4.05.08.02 . 28.03	Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	500.187.285,00	363.937.285,00	72,76
4.05 . 4.05.08.02 . 28.05	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan	383.760.150,00	379.332.490,00	98,85
4.05 . 4.05.08.02 . 28.10	Kegiatan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat	88.894.684,00	87.190.464,00	98,08
4.05 . 4.05.08.03 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	78.620.856,00	73.092.913,00	92,97
4.05 . 4.05.08.03 . 01.02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.933.318,00	5.577.268,00	80,44
4.05 . 4.05.08.03 . 01.06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2.130.040,00	736.000,00	34,55
4.05 . 4.05.08.03 . 01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	37.200.000,00	37.050.000,00	99,60
4.05 . 4.05.08.03 . 01.09	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	7.250.000,00	7.187.200,00	99,13
4.05 . 4.05.08.03 . 01.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	12.689.198,00	11.114.450,00	87,59
4.05 . 4.05.08.03 . 01.11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.960.000,00	3.959.900,00	100,00
4.05 . 4.05.08.03 . 01.12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.267.300,00	803.200,00	63,38
4.05 . 4.05.08.03 . 01.14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.275.000,00	758.600,00	59,50
4.05 . 4.05.08.03 . 01.15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.956.000,00	1.950.000,00	99,69
4.05 . 4.05.08.03 . 01.17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.956.295,00	99,91
4.05 . 4.05.08.03 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	8.011.687,00	8.011.275,00	99,99
4.05 . 4.05.08.03 . 02.22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8.011.687,00	8.011.275,00	99,99
4.05 . 4.05.08.03 . 28	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	856.259.546,00	724.206.167,00	84,58
4.05 . 4.05.08.03 . 28.01	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	3.965.500,00	3.783.455,00	95,41
4.05 . 4.05.08.03 . 28.03	Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	424.662.500,00	292.972.250,00	68,99
4.05 . 4.05.08.03 . 28.05	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan	376.800.000,00	376.800.000,00	100,00
4.05 . 4.05.08.03 . 28.10	Kegiatan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat	50.831.546,00	50.650.462,00	99,64
4.05 . 4.05.08.04 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	108.127.228,00	89.581.887,00	82,85
4.05 . 4.05.08.04 . 01.02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.424.840,00	14.418.532,00	49,00
4.05 . 4.05.08.04 . 01.06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	9.847.360,00	9.696.716,00	98,47
4.05 . 4.05.08.04 . 01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	37.200.000,00	36.914.950,00	99,23
4.05 . 4.05.08.04 . 01.09	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	3.450.000,00	3.450.000,00	100,00
4.05 . 4.05.08.04 . 01.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	6.109.298,00	6.108.972,00	99,99
4.05 . 4.05.08.04 . 01.11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	2.399.000,00	99,96
4.05 . 4.05.08.04 . 01.12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.304.730,00	7.299.717,00	99,93
4.05 . 4.05.08.04 . 01.14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.531.000,00	3.530.000,00	99,97
4.05 . 4.05.08.04 . 01.15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.076.000,00	1.980.000,00	39,01
4.05 . 4.05.08.04 . 01.17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	3.784.000,00	3.784.000,00	100,00
4.05 . 4.05.08.04 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	21.045.177,00	20.900.000,00	99,31

4.05 . 4.05.08.04 . 02.22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	21.045.177,00	20.900.000,00	99,31
4.05 . 4.05.08.04 . 28	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	666.639.500,00	543.559.000,00	81,54
4.05 . 4.05.08.04 . 28.01	Kegiatan Fasilitas Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	3.853.000,00	0,00	0,00
4.05 . 4.05.08.04 . 28.03	Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	351.836.000,00	258.945.000,00	73,60
4.05 . 4.05.08.04 . 28.05	Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan	249.436.500,00	223.400.000,00	89,56
4.05 . 4.05.08.04 . 28.10	Kegiatan Fasilitas Kesejahteraan Sosial Masyarakat	61.514.000,00	61.214.000,00	99,51
	<b>Jumlah</b>	<b>8.402.610.691,69</b>	<b>6.859.046.949,00</b>	<b>81,63</b>

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan masyarakat disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

#### Faktor Pendukung Capaian Kinerja

- a. SOP Pelayanan Telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan
- b. Persyaratan dan prosedur Pelayanan Publik sudah dipublikasikan sehingga masyarakat dapat mengontrol setiap pelayanan yang diberikan
- c. Sudah adanya Motto Pelayanan dan Ikrar Pelayanan Publik di Kecamatan Cidadap
- d. Anggaran yang memadai ditunjang oleh swadaya murni masyarakat
- e. Peran aktif masyarakat Kecamatan Cidadap
- f. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Cidadap

#### Faktor Penghambat Capaian Kinerja

- Penyerapan anggaran yang besar di akhir tahun anggaran, dikarenakan regulasi mengenai Honorarium Non PNS dan Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber yang terlambat dan belum maksimal sehingga penyerapan anggaran terhambat.
- Kurang Pahaminya warga masyarakat mengenai SOP Pelayanan dan persyaratan dalam pelayanan public
- Masih adanya masyarakat yang menggunakan jasa perantara dalam mengurus dokumen kependudukan dan pelayanan lainnya.
- Pengesahan APBD dan APBDP Kota Bandung yang lambat
- Kurangnya koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Cidadap
- Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan masyarakat, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

Solusi/Rekomendasi perbaikan kinerja Triwulan / Tahun yang akan datang

- a. Mengajukan tambahan SDM kepada BKD di Kecamatan Cidadap
- b. Penguatan Regulasi dan atau aturan ditetapkan lebih cepat dan dan lebih jelas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir SOP, Prosedur dan regulasi mengenai pelayanan public akan dipublikasikan lebih luas kepada masyarakat
- c. Koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Cidadap lebih ditingkatkan.

## Sasaran 2

### Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.12  
**Analisis Pencapaian Sasaran 2**  
**Meningkatnya pemberdayaan masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Nilai	<b>77.5</b>	<b>77.92</b>	<b>100.54</b>	77.5	100.54%
Rata-rata Capaian Kinerja					102.54		

Sasaran Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "**Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**" adalah sebesar **77.92** dari target sebesar **77.5** yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga

persentase capaian kinerjanya adalah **100.54 %**, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra dari target 77,5 sehingga persentase capaian kinerjanya apabila dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2018 adalah sebesar **100.54 %**.

Tabel 3.13  
**Analisis Pencapaian Sasaran 2**  
**Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dibandingkan tahun sebelumnya**

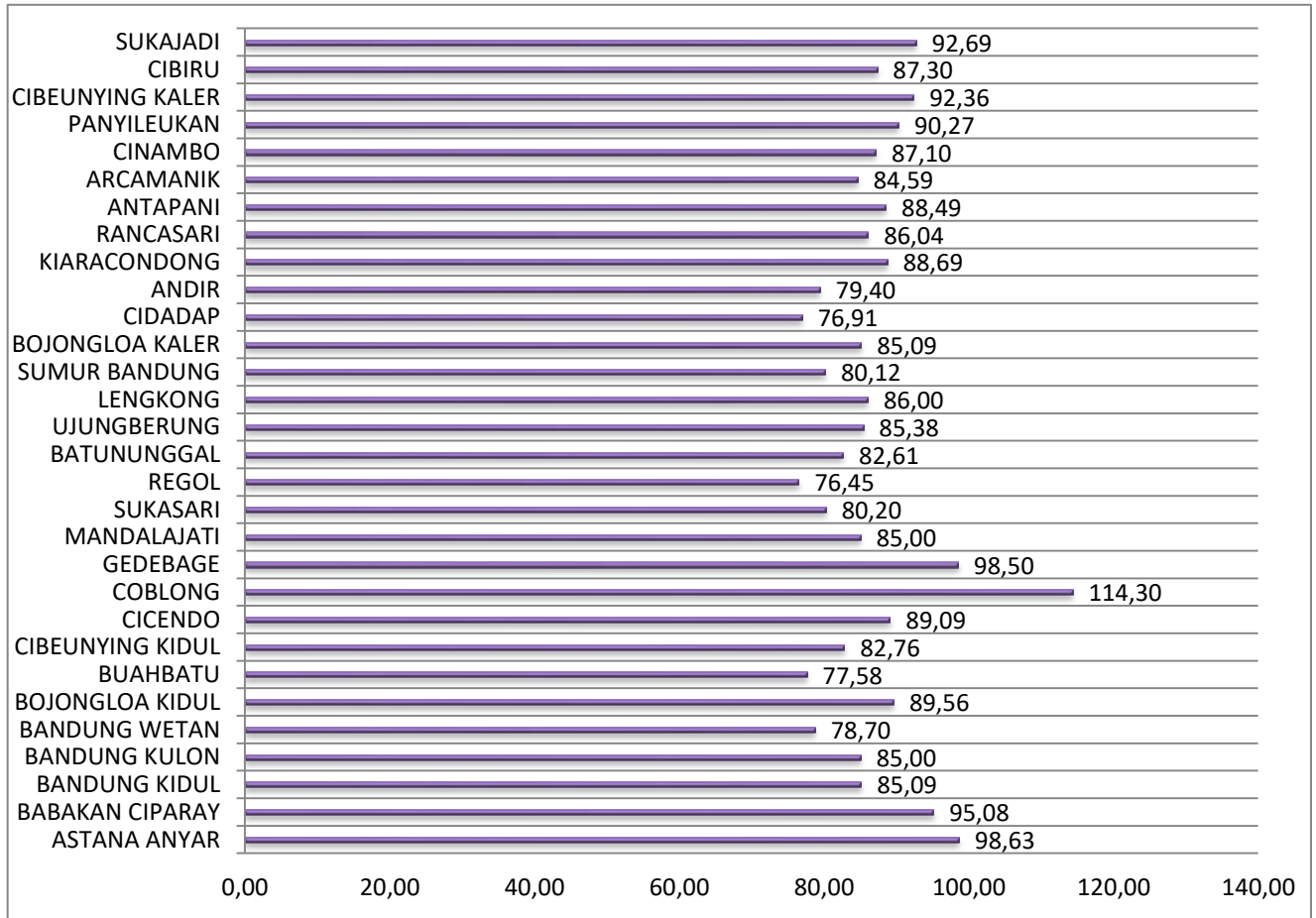
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%			0.00			0.00	75	76.91	102.54	77.5	77.92	100.54

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan" tahun ini baru di hitung rata rata dari 3 (tiga) kriteria, adapun untuk melihat perbandingan capaian kinerja dengan Kecamatan lainnya adalah sebagai berikut :

**CIDADAP**  
Kota Bandung

Grafik 3.4

**Grafik Perbandingan % Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dengan Kecamatan Lainnya di Kota Bandung**



Sumber : <http://lakip.bandung.go.id>

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan" tahun ini adalah sebesar 100.54 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Cidadap maka capaian kerjanya mencapai 100 %. Walaupun tahun ke 5 (lima) Renstra tetapi Indikator Kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2016 karena indikator Tingkat Pemberdayaan Masyarakat ini merupakan Indikator baru yang baru ditetapkan dalam Indikator Kinerja Kecamatan Cidadap pada tahun 2017.

### Indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

terdiri dari 3 (tiga) Komponen pengukuran yaitu :

- a. Kriteria RW Juara
- b. LKK Aktif
- c. Siskamling Aktif

Masing masing komponen memiliki kriteria yang harus dipenuhi yang selanjutnya akan di hitung persentase capaiannya. Kriteria tersebut telah disampaikan pada BAB II laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Adapun untuk menghitung capaian kinerja adalah sebagai berikut : **% Rata rata RW JUARA + LKK JUARA dan SISKAMLING AKTIF**. Adapun hasil perhitungan indikator % tingkat pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14

#### Tabulasi capaian indikator Tingkat pemberdayaan masyarakat

No.	Sasaran	Indikator Sasaran (Outcome)/Indikator Capaian Program	Tar get	Sat uan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan	Formulasi Pengukuran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	75	%	77.92 %	100.6 %	RW Juara = 64.50 % LKK Juara = 100 % Siskamling aktif = 69.26 %	% Rata rata RW JUARA + LKK JUARA dan SISKAMLING AKTIF (Tabulasi Pengukuran Terlampir)

Untuk kriteria Persentase RW Juara dan persentase LKK Juara dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena pada tahun 2015 s.d 2017 kriteria RW Juara dan LKK Aktif menjadi Indikator Sasaran Kinerja Strategis Kecamatan Cidadap pada tahun 2015 s.d 2017, adapun perbandingan capaian kerjanya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.15

**Tabulasi Pencapaian  
Indikator RW Juara dan Lembaga Kemasyarakatan Aktif  
selama 3 tahun Pelaksanaan di Kecamatan Cidadap**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	
1	Prosentase RW Juara	%	-	-		-	-		43.68	47.62	109.02	65.5	66.88	102.11
2	Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	Ninai	-	-		-	-		75	76.91	102.54	77.5	77.97	100.6

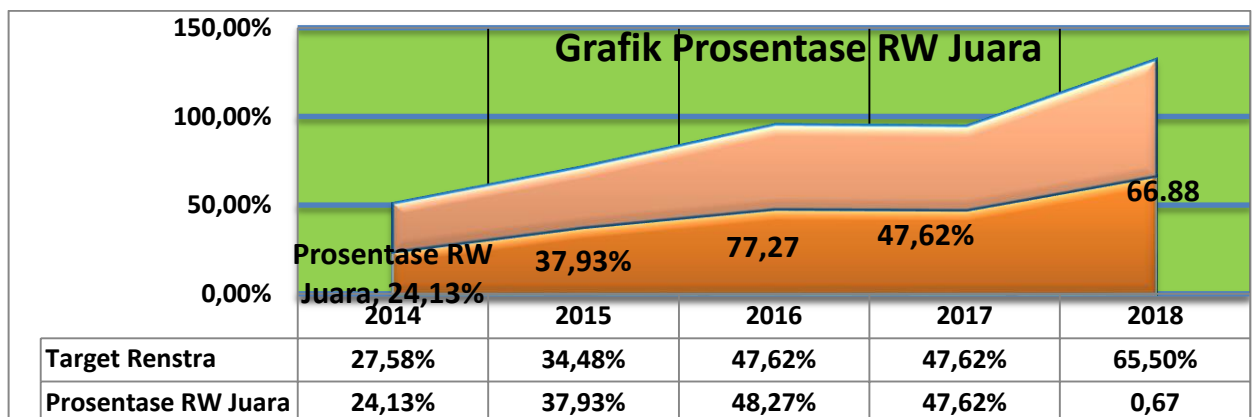
**Analisis Capaian kriteria Prosentase RW Juara**

Kriteria RW Juara apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya mengalami kenaikan dimana pada tahun 2017 realisasi sebesar 47.62 % dan pada tahun 2018 menjadi 66.88 %. Hal itu apabila dianalisis berarti ada kenaikan jumlah RW Juara sebanyak 1 (satu) RW. Hasil analisis kami bahwa kenaikan RW ini disebabkan pada kriteria pengolahan sampah berbasis rumah tangga, pada tahun 2018 ini Pengurus RW tersebut melakukan pengolahan sampah seperti kriteria yang ditentukan sehingga masuk dalam kriteria RW yang memiliki metode pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.

Apabila dilihat dalam grafik pencapaian RW juara dari tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 3.5

**Grafik Peningkatan Prosentase RW Juara**



Dari Grafik diatas dapat dilihat pencapaian sebesar 47.62 % untuk capaian tahun 2017 dan 34.48% pada tahun 2016 menunjukkan kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014 yaitu sebesar 48.27 %. Peningkatan yang cukup berarti ini menunjukkan bahwa peran pemerintah Kecamatan dan Kelurahan cukup baik dalam mensosialisasikan Roadmap Walikota dan menjadikan katalisator dalam program dan kegiatan di tingkat RW sehingga dapat sesuai dengan Janji Walikota dan Roadmap Walikota Bandung.

Nilai kemajuan yang cukup besar ini didorong pula oleh Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan, dimana program tersebut menunjang pembangunan di tingkat RW yang proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya langsung dilakukan oleh RT dan RW setempat serta berkoordinasi dengan pemerintah Kelurahan dan Kecamatan. Dengan adanya koordinasi inilah pembangunan di tingkat RW dan RT menjadi lebih terprogram dan terarah sesuai dengan Roadmap Bandung Juara serta disesuaikan juga dengan kriteria RW Juara. Dengan demikian kriteria RW Juara di Kecamatan Cidadap meningkat dengan cepat, hal ini membuktikan adanya sinergitas antara pemerintah Kelurahan dan Kecamatan dengan para ketua RW dan RT.

**Solusi** untuk pemenuhan kriteria ini memang diperlukan peningkatan partisipasi dari masyarakat, untuk itu pada tahun 2018 perlu adanya program dan kegiatan yang bersifat rangsangan, seperti pengadaan alat biodigester untuk RW agar di tiap RW ada pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Diharapkan dengan adanya program dan kegiatan yang bersifat rangsangan partisipasi dan peran aktif masyarakat akan lebih meningkat.

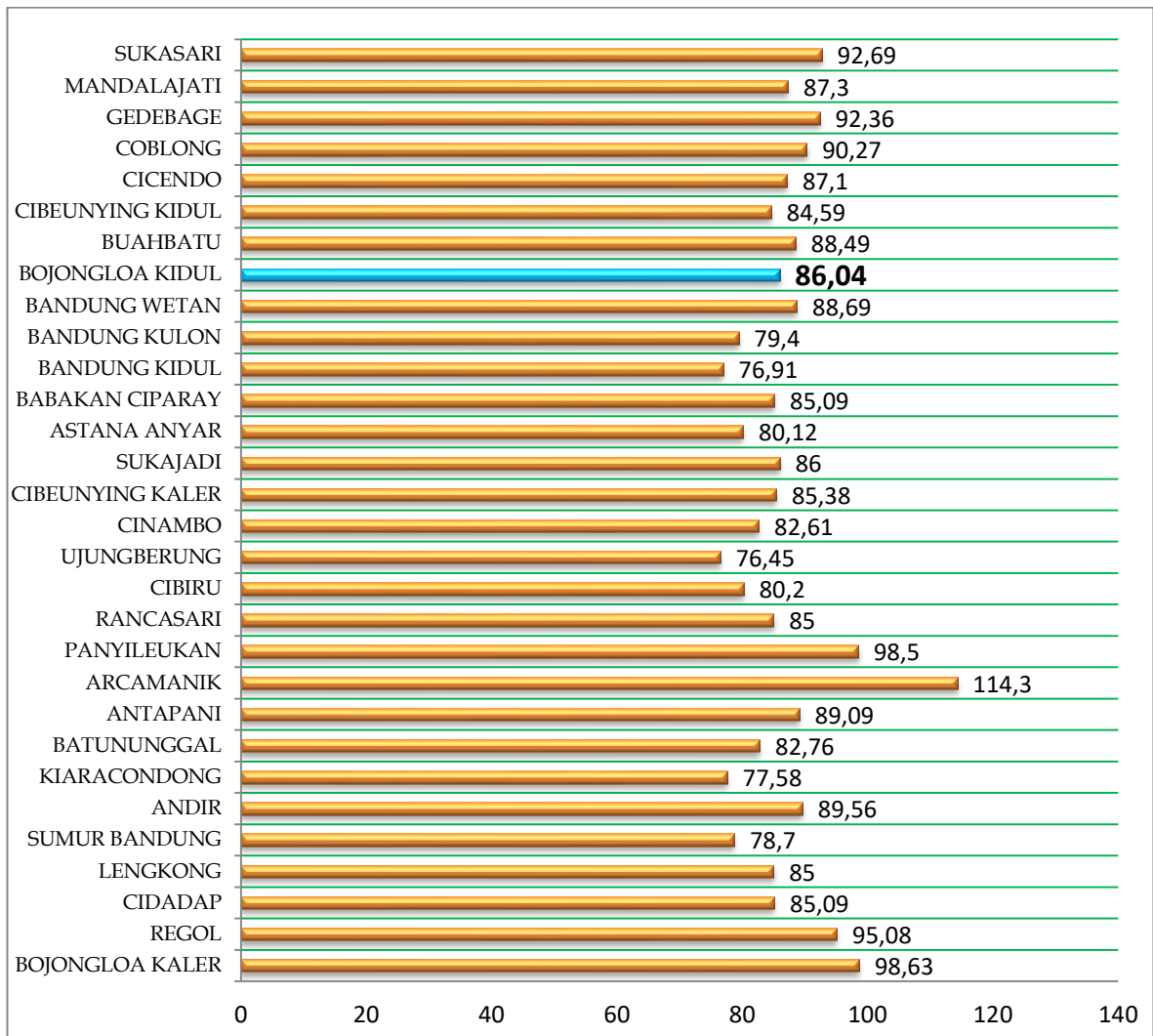
Untuk meningkatkan nilai indikator tersebut pada periode yang akan datang, kami akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk mempermudah akselerasi pencapaian RW Juara, yaitu dengan melakukan sosialisasi dan menawarkan kepada RW untuk menerima bantuan program pengolahan sampah berbasis RW dari Pemerintah Kota Bandung.

Capaian kinerja indikator **Prosentase RW Juara** adalah sebesar 66.88% bila dibandingkan dengan Kecamatan lainnya di Kota Bandung dapat dilihat sebagai berikut.



Grafik 3.6

**Grafik Perbandingan indikator Prosentase RW Juara dengan Kecamatan Se Kota Bandung**



Kota Bandung

Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator Prosentase RW juara ini sangat beragam karena sangat tergantung pada jumlah RW di tiap Kecamatan. Perbedaan Jumlah RW antar kecamatan pun cukup signifikan, hal tersebut tentu saja menjadikan nilai capaian yang rendah dan beragam. Untuk di Kecamatan Cidadap sendiri dari **29** RW terdapat  $\pm$  **19** RW sudah memiliki kriteria JUARA. Apabila melihat capaian persentase RW juara di tiap tiap Kecamatan di Kota Bandung, dapat terlihat bahwa capaian yang didapat oleh Kecamatan Cidadap merupakan capaian presentase yang cukup besar. Hal tersebut membuktikan bawa Lembaga RT dan RW di Kecamatan Cidadap telah memiliki program kerja dan kegiatan kegiatan yang telah sejalan dengan program pemerintah Kota Bandung dan Roadmap Walikota Bandung selama 4 (empat) tahun pelaksanaan.

### **Analisis Capaian indikator Prosentase Lembaga Kemasyarakatan aktif**

Selanjutnya adalah Capaian kinerja **indikator Prosentase Lembaga Kemasyarakatan aktif** adalah sebesar 100% dari target yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yaitu sebesar 77.5%, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 133.33% atau melampaui dengan target yang diperjanjikan. Tahun 2018 adalah tahun lima renstra, capaian tahun 2018 sebesar 100 % meningkat daripada capaian tahun 2017 mencapai 71,43 % bila diperhatikan hal ini mengalami trend yang meningkat.

Untuk mengetahui perhitungan mengenai capaian Kinerja ini dapat dilihat pada rumusan sebagai berikut ini

#### **Rumus Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif :**

**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi kriteria aktif**

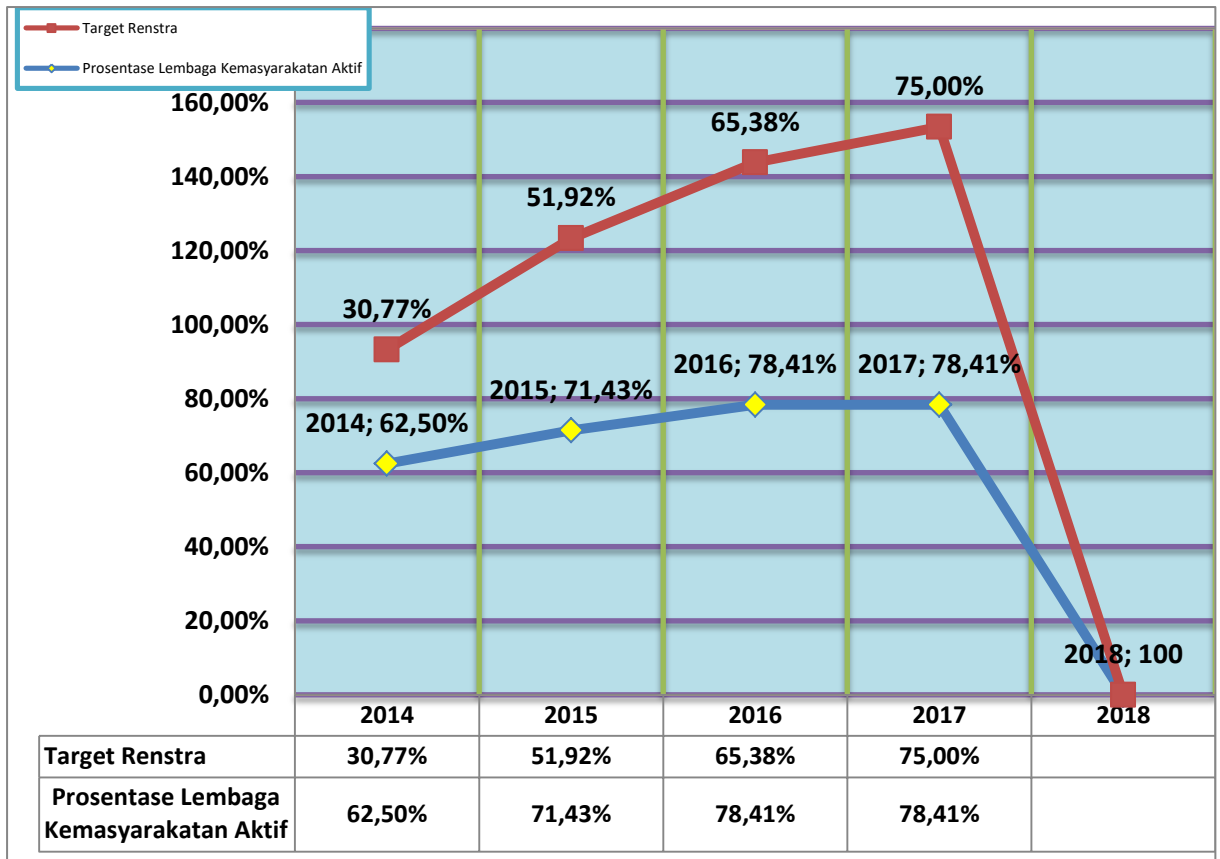
**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan**

**X 100%**

Mengenai populasi yang dinilai adalah sebanyak 11 unit yaitu terdiri PKK Kelurahan (3 kelurahan), LPM Kelurahan (3 Kelurahan), Karang Taruna (3 Kelurahan), LPM Kecamatan dan PKK Kecamatan

Adapun perbandingan dengan capaian pada tahun 2018 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.7  
**Grafik Perbandingan capaian tahun tahun sebelumnya**



Dari Grafik diatas dapat dilihat pencapaian sebesar **100%** pada tahun 2018 dan menunjukan kemajuan yang signifikan dibandingkan pada tahun 2017 yaitu menjadi **78,41 %**. Pencapaian ini menunjukan bahwa peran pemerintah Kecamatan dan Kelurahan cukup baik dalam mensosialisasikan Roadmap Walikota dan menjadikan katalisator dalam program dan kegiatan di Karang Taruna Kelurahan, PKK Kelurahan dan LPM Kelurahan sehingga dapat sesuai dengan Janji Walikota dan Roadmap Walikota Bandung.

Nilai kemajuan yang cukup besar ini didorong pula oleh Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan, dimana program tersebut menunjang pembangunan Fisik dan Non fisik ( ekonomi, social, budaya) yang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya langsung dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan setempat serta berkoordinasi dengan pemerintah Kelurahan dan Kecamatan. Dengan adanya koordinasi inilah pembangunan di Lembaga Kemasyarakatan yang menjadi mitra pemerintah menjadi lebih terprogram dan terarah sesuai dengan Roadmap Bandung Juara serta disesuaikan juga dengan kriteria Lembaga

Kemasyarakatan Aktif. Dengan demikian kriteria Lembaga Kemasyarakatan Aktif di Kecamatan Cidadap meningkat dengan cepat, hal ini membuktikan adanya keseriusan dari lembaga kemasyarakatan dalam membuat program kerja dengan menyelaraskan program kerja antara pemerintah Kelurahan dan Kecamatan dengan program PKK, LPM dan Karang Taruna Kelurahan.

Dalam rangka melaksanakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan ada 4 (empat) kegiatan untuk setiap LKK, yaitu kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup RW, LPM, PKK, dan Karang Taruna.

Indikator keberhasilan PIPPK merupakan salah satu indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018, termasuk pada misi ketiga yaitu Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing.

Indikator tersebut menggambarkan political will Walikota untuk meningkatkan pemberdayaan LKK sebagai bagian dari desentralisasi kewenangan dan percepatan pelaksanaan pembangunan kewilayahan.

Rencananya Target kinerja tahunan PIPPK akan diukur dengan melakukan evaluasi keberhasilan penyelenggaraan program berbasis kewilayahan dengan menghubungkan kinerja 4 (empat) kelompok LKK dalam memberikan dukungan terhadap keberhasilan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta SPM bidang sosial.

Dana anggaran Rp. 100.000.000,00- dari Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan yang dialokasikan masing masing bagi LPM, PKK, dan Karang Taruna Kelurahan berhasil menjadi stimulan bagi lembaga kemasyarakatan untuk menyusun program kerja dan melaksanakannya, serta menjadi perangsang bagi lembaga kemasyarakatan untuk berperan aktif dalam menunjang program pemerintah.

Pada periode tahun yang akan datang diharapkan Lembaga Kemasyarakatan seperti LPM, PKK dan Karang taruna dapat berperan lebih banyak sehubungan akan bergulirnya Program Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan (PIPPK), dimana untuk setiap Lembaga Kemasyarakatan tersebut akan dianggarkan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00- berupa program dan kegiatan yang di anggarkan dalam DPA masing masing kelurahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peran masing-masing

lembaga. Sehingga diharapkan akan meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Cidadap secara keseluruhan.

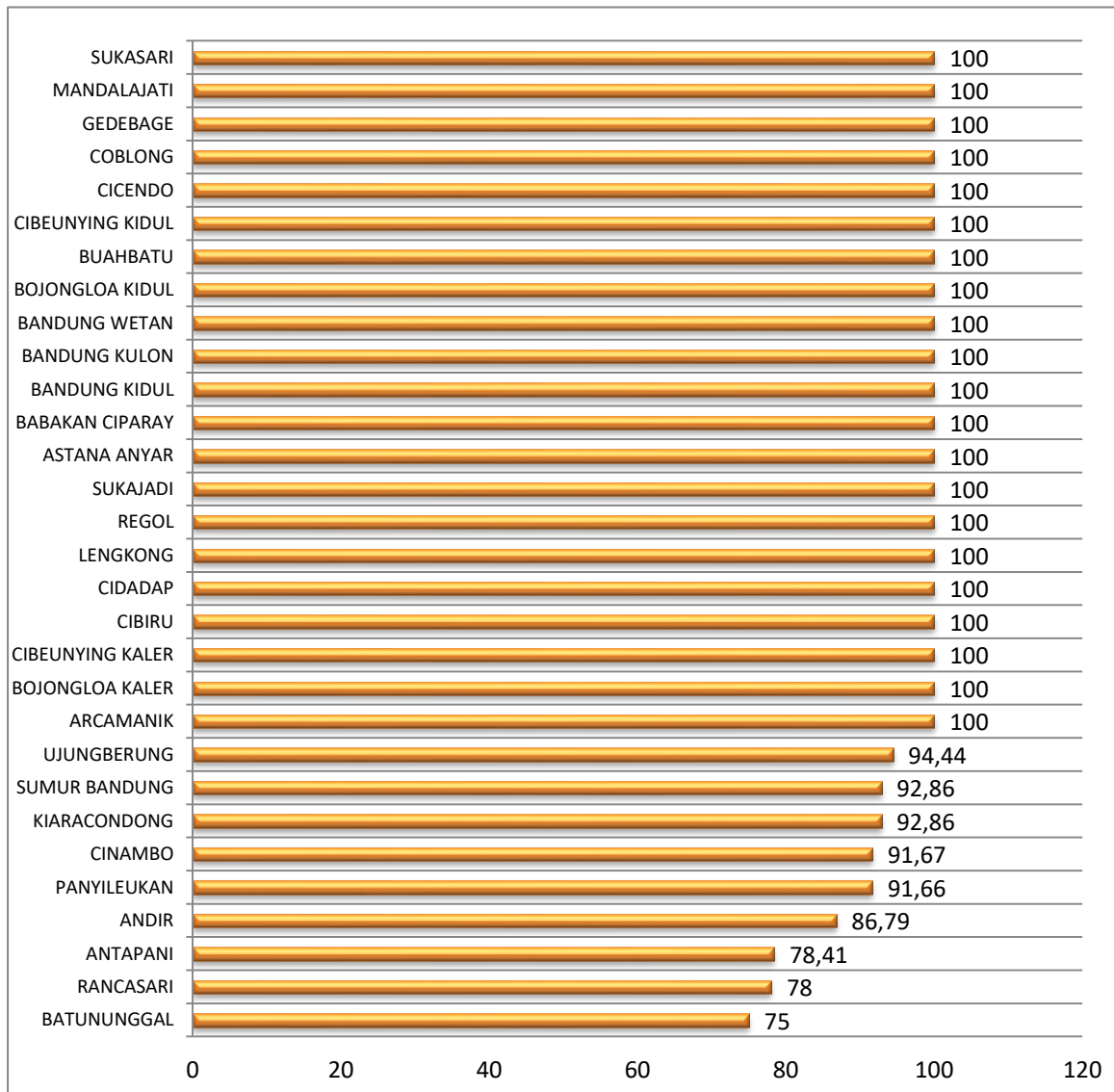
**Solusi** Untuk peningkatan pencapaian indikator lembaga kemasyarakatan aktif memang diperlukan peningkatan partisipasi aktif dari setiap kelompok masyarakat baik ditingkat Kecamatan maupun ditingkat Kelurahan, untuk itu pada tahun 2018 perlu adanya program dan kegiatan yang bersifat menunjang terhadap aktivitas setiap kelompok masyarakat, seperti penunjang pelaksanaan administrasi setiap lembaga masyarakat (PKK, Karang Taruna dan LPM), anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan rutin lembaga masyarakat (PKK, Karang Taruna dan LPM) dan anggaran penunjang kegiatan lembaga masyarakat (PKK, Karang Taruna dan LPM) yang bersifat inovatif. Diharapkan dengan adanya program dan kegiatan yang menunjang aktivitas lembaga masyarakat (PKK, Karang Taruna dan LPM) lembaga masyarakat ini dapat berperan lebih aktif).

Dalam menindaklanjuti solusi tersebut diatas maka kami akan menerbitkan surat edaran Camat Cidadap kepada para ketua LKK untuk mengingatkan kembali mengenai program kerja Pemerintah Kota Bandung agar terjadi keselarasan program kerja pemerintah kota dan LKK yang ada di Kecamatan.

Capaian kinerja nyata indikator **kriteria Prosentase Lembaga Kemasyarakatan aktif** adalah sebesar **100 %**, adapun jika dibandingkan capaian kinerja Kecamatan Cidadap dengan Kecamatan lainnya di Kota Bandung dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.8

**Grafik indikator Prosentase Lembaga Kemasyarakatan aktif dengan Kecamatan Se Kota Bandung**



Kecamatan Sumur Bandung dan Kecamatan Ujung Berung yang berarti semua lembaga kemasyarakatan di kecamatan tersebut sudah masuk kriteria aktif. Untuk nilai capaian terendah indikator kriteria ini adalah Kecamatan Bandung Kidul dan Kecamatan Regol dengan raihan capaian kinerja sebesar 75 %.

Hal tersebut membuktikan bahwa Kecamatan Cidadap sudah cukup baik dalam melakukan pembinaan dan bermitra dengan Lembaga Kemasyarakatan seperti LPM, PKK dan Karang Taruna yang berada di wilayah kerja Kecamatan Cidadap, tetapi masih harus tetap ditingkatkan karena masih jauh dari nilai sempurna.

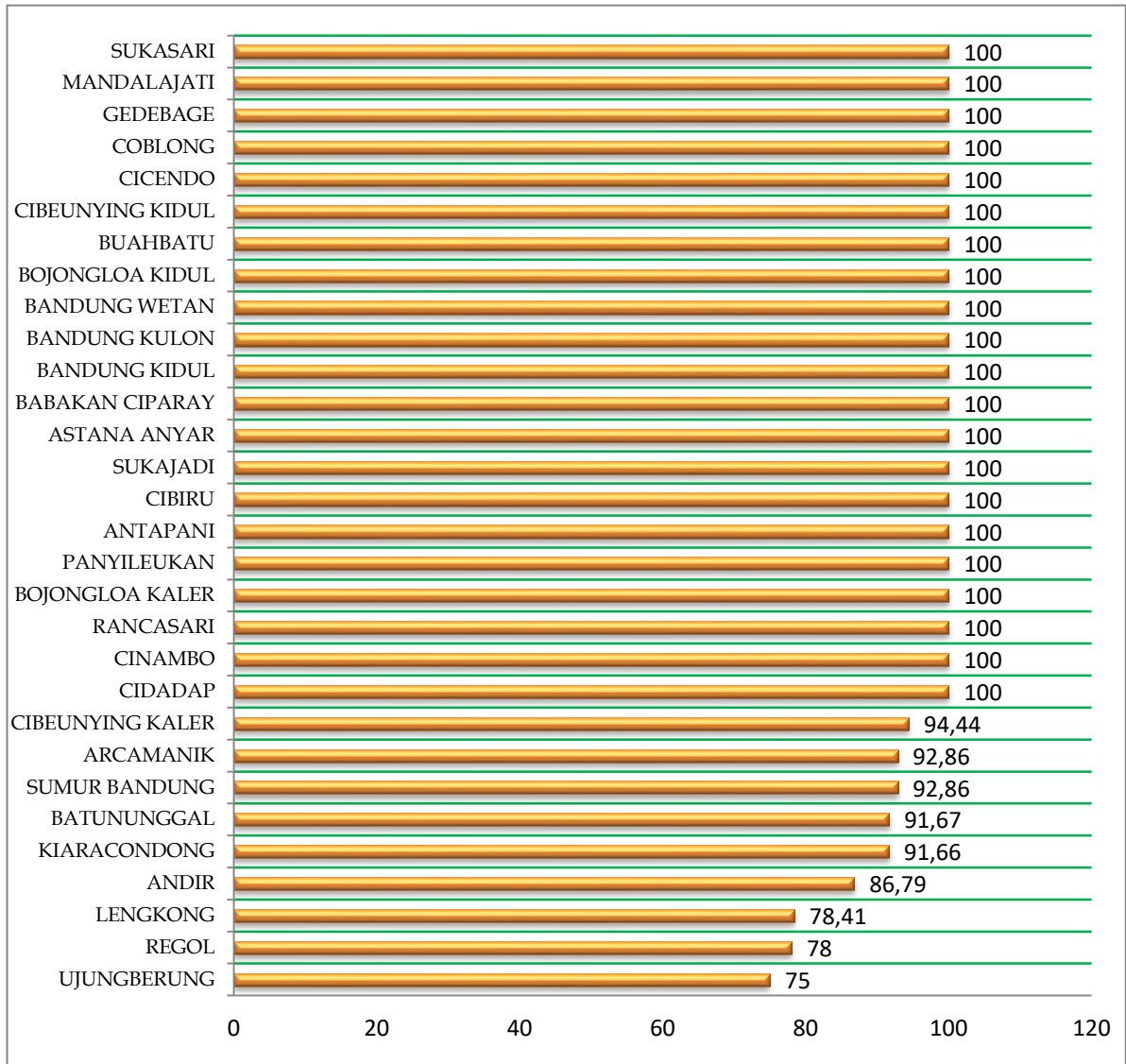
Selanjutnya adalah Capaian **kriteria % Siskamling Aktif** persentase capaian kinerjanya adalah 69.26%. Kriteria % siskamling aktif ini memiliki 5 (lima) indikator yaitu :

1. Adanya Pengurus
2. Adanya Kelompok Siskamling
3. Adanya Jadwal Siskamling
4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling
5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)

Dengan capaian 69.26% berarti tidak semua 29 RW di Kecamatan Cidadap memiliki Siskamling aktif dan memenuhi kelima indikator yang ditetapkan oleh Kecamatan. Hal tersebut membuktikan bahwa belum taatnya para ketua RW dalam upaya memenuhi dan mendukung program Pemerintah Kota Bandung.



Grafik 3.9  
**Grafik Perbandingan Kriteria Siskamling Aktif  
 Kecamatan Se Kota Bandung**



Sumber : <http://lakip.bandung.go.id>

Output yang ingin dicapai dari kriteria ini adalah ingin menciptakan lingkungan yang aman dan petugas yang tanggap dalam menghadapi tindak kejahatan di lingkungan RT dan RW.

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan" tahun ini adalah sebesar 102.54 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Cidadap maka capaian kerjanya mencapai 109.08 %. Walaupun tahun ke 5 (lima) Renstra tetapi Indikator Kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya karena indikator Tingkat Pemberdayaan Masyarakat ini



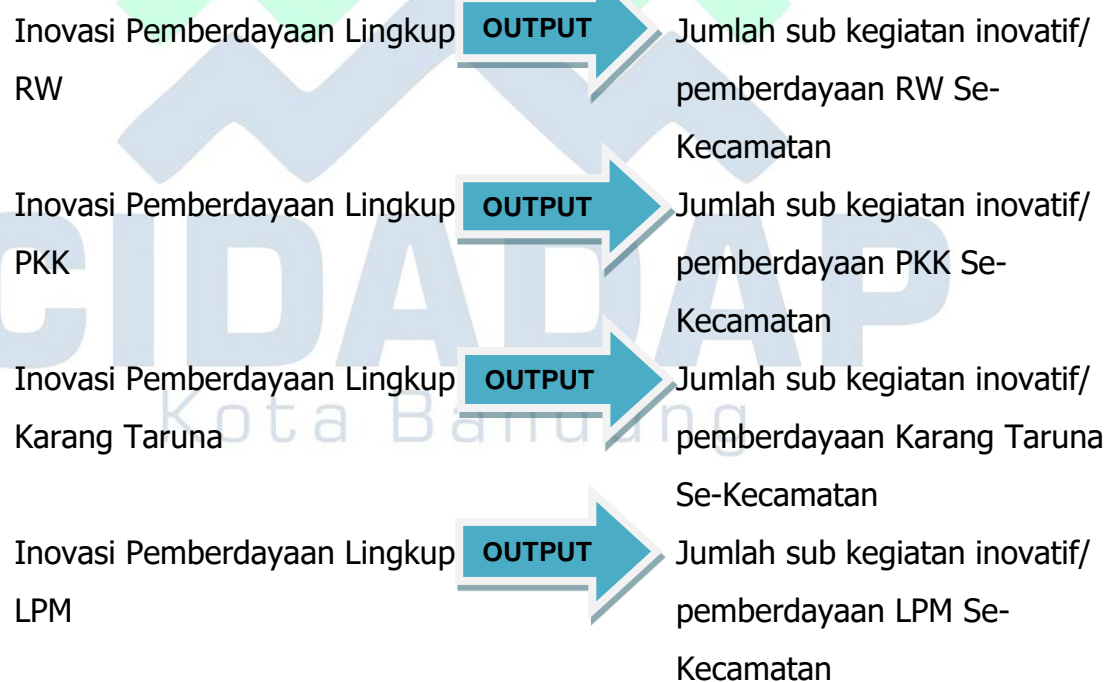
merupakan Indikator baru yang baru ditetapkan dalam Indikator Kinerja Kecamatan Cidadap pada tahun 2018.

### **Indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**

terdiri dari 3 (tiga) Komponen pengukuran yaitu :

- ❖ Kriteria RW Juara
- ❖ LKK Aktif
- ❖ Siskamling Aktif

Masing masing komponen memiliki kriteria yang harus dipenuhi yang selanjutnya akan di hitung persentase capaiannya. Kriteria tersebut telah disampaikan pada BAB II laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Adapun untuk menghitung capaian kinerja adalah sebagai berikut : **% Rata rata RW JUARA + LKK JUARA dan SISKAMLING AKTIF**. Adapun program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cidadap dalam memenuhi sasaran ini adalah Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan. Program ini memiliki kegiatan dan output sebagai berikut :



Adapun outcome yang ingin dicapai dari program ini adalah Persentase Peran serta lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat. Secara aplikasi di kewilayahan bentuk dari pemberdayaan ini adalah untuk memberdayakan LPM, RW, PKK dan Karang Taruna pada implementasi Tahun ke empat menjadi terobosan dalam percepatan pencapaian target pembangunan dengan semangat desentralisasi, dimana kewilayahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat mendapat porsi yang sangat besar dari sisi kewenangan

dan anggaran. Janji yang diwujudkan dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) menjadi inovasi pembangunan Kota Bandung di tingkat kewilayahan, seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Bandung. Mengenai target tingkat pemberdayaan masyarakat **Tinggi** dalam RPJMD, capaian kinerja kecamatan Cidadap dalam pemberdayaan masyarakat termasuk dalam kategori tinggi dimana capaian kerjanya mencapai **76.91 %**. Capaian ini diraih dengan rincian sebagai berikut :

- **RW Juara = 64.50 %**
- **LKK Juara = 100%**
- **Siskamling aktif = 69.26 %**

Maka diperoleh capaian rata rata **77.92 %**. Capaian 77.92% masuk dalam kategori **tinggi** dan telah memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018, adapun kategori tinggi, rendah ataupun sedang dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.17

**Tabel Tabulasi Kategori Kategori Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat tinggi	> 90
<b>2</b>	<b>Tinggi</b>	<b>75.00 – 89.99</b>
3	Sedang	65.00 – 74.99
4	Kurang	50.00 – 64.99
5	Sangat Kurang	0 – 49.99

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya pemberdayaan masyarakat disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

**Faktor pendukung :**

1. Anggaran yang tidak memadai, namun ditunjang oleh swadaya murni masyarakat
2. Peran aktif masyarakat Kecamatan Cidadap

**Faktor Penghambat**

1. Peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis berubah-ubah

2. Kurangnya koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Cidadap
3. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian
4. Komponen dalam aplikasi e-budgeting belum mengakomodasi semua kebutuhan Masyarakat dan LKK.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

Solusi/Rekomendasi perbaikan kinerja Triwulan / Tahun yang akan datang

- ✓ Mengajukan tambahan SDM kepada BKPP di Kecamatan Cidadap
- ✓ Menerbitkan Surat Edaran Camat Cidadap mengenai anjuran untuk para RW dan Ketua LKK agar menyesuaikan dengan program prioritas pemerintah Kota Bandung
- ✓ Koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Cidadap lebih ditingkatkan.

## Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran 2

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat didukung oleh Program :

No.	PROGRAM	URAIAN/ PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
1.	<b>Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan</b>	Mewujudkan <b>masyarakat yang madani</b> ( <i>civil society</i> ) Meningkatkan <b>fungsi, kemampuan dan peranan Lembaga Kemasyarakatan di tingkat Kewilyahan</b> untuk menampung, menyalurkan aspirasi, mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan serta mampu mengelola proses pembangunan secara inovatif dan mandiri. Meningkatkan <b>kemampuan sumber daya manusia</b> melalui pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat sebagai upaya menumbuhkan inovasi, kreativitas, motivasi dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

		<p>Meningkatkan <b>Peran Serta dan partisipasi masyarakat</b> dalam pembangunan di kewilayahan;</p> <p><b>Mengakselerasi</b> pelaksanaan pembangunan melalui <b>semangat kolaborasi dan desentralisasi</b></p>
--	--	--

Penyerapan Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan pada Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan dengan realisasi penyerapan pada akhir tahun sebesar Rp. 1.839.001.213,00,- dari Anggaran sebesar Rp. 2.361.876.862,69,- dengan prosentase sebesar 77.86%. Adapun rincian penyerapan anggaran sasaran ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.18

**Program Dan Kegiatan Yang Menunjang Capaian Sasaran  
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cidadap**

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Dampak (baik/ kurang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	<b>Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaa n Kewilayahan</b>	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW	1.670.032.712,69	1.156.553.861,00	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan RW Se- Kecamatan	Baik
		Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK	202.930.750,00	201.654.357,00	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan PKK Se- Kecamatan	Baik
		Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	258.840.900,00	251.532.095,00	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan Karang Taruna Se-Kecamatan	Baik
		Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM	230.072.500,00	229.260.900,00	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan LPM Se- Kecamatan	Baik

### 3.2 Akuntabilitas Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 15.585.008.360,00 atau mencapai 88.73 % dari alokasi anggaran sebesar Rp 17.565.393.710,69.

Adapun untuk realisasi belanja langsung dan tidak langsung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.19  
**Realisasi Anggaran BTL dan BL  
Kantor Kecamatan Cidadap Tahun Anggaran 2018**

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>			
	Belanja Pegawai – Gaji dan Tunjangan	9.162.783.019,00	8.739.006.911,00	95.38%
2	<b>Belanja Langsung</b>			
	Belanja pegawai	2.694.200.000,00	2.289.708.000,00	84.99
	Belanja Barang & Jasa	5.138.136.172,42	4.501.403.449,00	87.61
	Belanja Modal	570.274.519,27	54.890.000,00	9.63
	<b>Total</b>	17.565.393.710,69	15.585.008.360,00	88.73

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan Cidadap Kota Bandung pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.21**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Cidadap Kota Bandung**  
**Tahun 2018**

Kode Rekening	Program / Kegiatan	ANGGARAN	ANGGARAN	
			TOTAL	%
2.07 . 4.05.08.02 . 22	<b>Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan</b>	927.219.709,00	543.309.715,00	58,60
2.07 . 4.05.08.02 . 22.01	Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW	679.347.959,00	295.813.465,00	43,54
2.07 . 4.05.08.02 . 22.02	Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK	73.277.250,00	72.902.250,00	99,49
2.07 . 4.05.08.02 . 22.03	Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	91.020.000,00	91.020.000,00	100,00
2.07 . 4.05.08.02 . 22.04	Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM	83.574.500,00	83.574.000,00	100,00
2.07 . 4.05.08.03 . 22	<b>Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan</b>	830.868.100,77	789.006.113,00	94,96
2.07 . 4.05.08.03 . 22.01	Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW	625.301.700,77	587.626.011,00	93,97
2.07 . 4.05.08.03 . 22.02	Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK	67.331.500,00	66.430.107,00	98,66
2.07 . 4.05.08.03 . 22.03	Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	85.292.900,00	82.221.095,00	96,40
2.07 . 4.05.08.03 . 22.04	Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM	52.942.000,00	52.728.900,00	99,60
2.07 . 4.05.08.04 . 22	<b>Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan</b>	603.789.052,92	506.685.385,00	83,92
2.07 . 4.05.08.04 . 22.01	Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW	365.383.052,92	273.114.385,00	74,75
2.07 . 4.05.08.04 . 22.02	Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK	62.322.000,00	62.322.000,00	100,00
2.07 . 4.05.08.04 . 22.03	Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	82.528.000,00	78.291.000,00	94,87
2.07 . 4.05.08.04 . 22.04	Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM	93.556.000,00	92.958.000,00	99,36
<b>4.05 . 4.05.08.01 . 01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>783.598.919,00</b>	<b>697.763.206,00</b>	<b>89,05</b>
4.05 . 4.05.08.01 . 01.02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.067.680,00	60.385.263,00	60,95
4.05 . 4.05.08.01 . 01.06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	10.554.200,00	6.907.700,00	65,45
4.05 . 4.05.08.01 . 01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	111.000.000,00	110.524.500,00	99,57
4.05 . 4.05.08.01 . 01.09	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	18.850.000,00	9.325.000,00	49,47
4.05 . 4.05.08.01 . 01.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.271.106,00	25.103.606,00	99,34
4.05 . 4.05.08.01 . 01.11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.228.200,00	9.451.637,00	84,18
4.05 . 4.05.08.01 . 01.12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.555.233,00	3.501.000,00	98,47
4.05 . 4.05.08.01 . 01.14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.582.000,00	6.400.200,00	47,12
4.05 . 4.05.08.01 . 01.15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.876.000,00	5.616.000,00	81,68
4.05 . 4.05.08.01 . 01.17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	25.914.500,00	25.749.300,00	99,36
4.05 . 4.05.08.01 . 01.18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	97.900.000,00	97.599.000,00	99,69
4.05 . 4.05.08.01 . 01.19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	270.100.000,00	270.000.000,00	99,96
4.05 . 4.05.08.01 . 01.20	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	67.700.000,00	67.200.000,00	99,26
4.05 . 4.05.08.01 . 01.22	Penyediaan Jasa Media Cetak dan Teknologi Informasi	22.000.000,00	0,00	0,00
4.05 . 4.05.08.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>639.586.721,00</b>	<b>541.988.480,00</b>	<b>84,74</b>
4.05 . 4.05.08.01 . 02.22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	35.278.921,00	29.918.680,00	84,81
4.05 . 4.05.08.01 . 02.24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	540.730.000,00	482.979.800,00	89,32
4.05 . 4.05.08.01 . 02.45	Pembangunan sistem pelayanan dan database terpadu	63.577.800,00	29.090.000,00	45,75
4.05 . 4.05.08.01 . 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>142.273.450,00</b>	<b>127.721.000,00</b>	<b>89,77</b>
4.05 . 4.05.08.01 . 28	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>1.568.297.962,00</b>	<b>1.194.338.332,00</b>	<b>76,16</b>
4.05 . 4.05.08.01 . 28.01	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	35.488.052,00	33.629.212,00	94,76
4.05 . 4.05.08.01 . 28.03	Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	252.065.360,00	131.170.300,00	52,04
4.05 . 4.05.08.01 . 28.04	Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	696.212.100,00	575.764.370,00	82,70
4.05 . 4.05.08.01 . 28.05	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum	87.665.000,00	67.758.400,00	77,29

	Kecamatan dan Kelurahan			
4.05 . 4.05.08.01 . 28.07	Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	27.218.000,00	13.648.500,00	50,15
4.05 . 4.05.08.01 . 28.09	Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	314.506.150,00	283.515.300,00	90,15
4.05 . 4.05.08.01 . 28.10	Kegiatan Fasilitas Kesejahteraan Sosial Masyarakat	155.143.300,00	88.852.250,00	57,27
<b>4.05 . 4.05.08.02 . 01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>93.523.864,00</b>	<b>72.015.237,00</b>	<b>77,00</b>
4.05 . 4.05.08.02 . 01.06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1.487.550,00	1.300.000,00	87,39
4.05 . 4.05.08.02 . 01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	37.200.000,00	34.150.000,00	91,80
4.05 . 4.05.08.02 . 01.09	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
4.05 . 4.05.08.02 . 01.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	7.845.049,00	5.189.553,00	66,15
4.05 . 4.05.08.02 . 01.11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.837.930,00	2.759.630,00	97,24
4.05 . 4.05.08.02 . 01.12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	764.775,00	764.198,00	99,92
4.05 . 4.05.08.02 . 01.14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.037.000,00	1.037.000,00	50,91
4.05 . 4.05.08.02 . 01.15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.016.000,00	810.000,00	40,18
4.05 . 4.05.08.02 . 01.17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	3.995.000,00	3.995.000,00	100,00
4.05 . 4.05.08.02 . 01.02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.840.560,00	15.509.856,00	53,78
4.05 . 4.05.08.02 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>80.386.800,00</b>	<b>74.888.000,00</b>	<b>93,16</b>
4.05 . 4.05.08.02 . 02.07	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	42.589.200,00	37.862.000,00	88,90
4.05 . 4.05.08.02 . 02.22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	37.797.600,00	37.026.000,00	97,96
4.05 . 4.05.08.02 . 28	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>994.362.119,00</b>	<b>851.980.239,00</b>	<b>85,68</b>
4.05 . 4.05.08.02 . 28.01	Kegiatan Fasilitas Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	21.520.000,00	21.520.000,00	100,00
4.05 . 4.05.08.02 . 28.03	Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	500.187.285,00	363.937.285,00	72,76
4.05 . 4.05.08.02 . 28.05	Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan	383.760.150,00	379.332.490,00	98,85
4.05 . 4.05.08.02 . 28.10	Kegiatan Fasilitas Kesejahteraan Sosial Masyarakat	88.894.684,00	87.190.464,00	98,08
<b>4.05 . 4.05.08.03 . 01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>78.620.856,00</b>	<b>73.092.913,00</b>	<b>92,97</b>
4.05 . 4.05.08.03 . 01.02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.933.318,00	5.577.268,00	80,44
4.05 . 4.05.08.03 . 01.06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2.130.040,00	736.000,00	34,55
4.05 . 4.05.08.03 . 01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	37.200.000,00	37.050.000,00	99,60
4.05 . 4.05.08.03 . 01.09	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	7.250.000,00	7.187.200,00	99,13
4.05 . 4.05.08.03 . 01.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	12.689.198,00	11.114.450,00	87,59
4.05 . 4.05.08.03 . 01.11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.960.000,00	3.959.900,00	100,00
4.05 . 4.05.08.03 . 01.12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.267.300,00	803.200,00	63,38
4.05 . 4.05.08.03 . 01.14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.275.000,00	758.600,00	59,50
4.05 . 4.05.08.03 . 01.15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.956.000,00	1.950.000,00	99,69
4.05 . 4.05.08.03 . 01.17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.956.295,00	99,91
4.05 . 4.05.08.03 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>8.011.687,00</b>	<b>8.011.275,00</b>	<b>99,99</b>
4.05 . 4.05.08.03 . 02.22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8.011.687,00	8.011.275,00	99,99
4.05 . 4.05.08.03 . 28	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>856.259.546,00</b>	<b>724.206.167,00</b>	<b>84,58</b>
4.05 . 4.05.08.03 . 28.01	Kegiatan Fasilitas Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	3.965.500,00	3.783.455,00	95,41
4.05 . 4.05.08.03 . 28.03	Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	424.662.500,00	292.972.250,00	68,99
4.05 . 4.05.08.03 . 28.05	Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan	376.800.000,00	376.800.000,00	100,00
4.05 . 4.05.08.03 . 28.10	Kegiatan Fasilitas Kesejahteraan Sosial Masyarakat	50.831.546,00	50.650.462,00	99,64
<b>4.05 . 4.05.08.04 . 01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>108.127.228,00</b>	<b>89.581.887,00</b>	<b>82,85</b>
4.05 . 4.05.08.04 . 01.02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.424.840,00	14.418.532,00	49,00
4.05 . 4.05.08.04 . 01.06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	9.847.360,00	9.696.716,00	98,47
4.05 . 4.05.08.04 . 01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	37.200.000,00	36.914.950,00	99,23
4.05 . 4.05.08.04 . 01.09	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	3.450.000,00	3.450.000,00	100,00
4.05 . 4.05.08.04 . 01.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	6.109.298,00	6.108.972,00	99,99
4.05 . 4.05.08.04 . 01.11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	2.399.000,00	99,96
4.05 . 4.05.08.04 . 01.12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.304.730,00	7.299.717,00	99,93

4.05 . 4.05.08.04 . 01.14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.531.000,00	3.530.000,00	99,97
4.05 . 4.05.08.04 . 01.15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.076.000,00	1.980.000,00	39,01
4.05 . 4.05.08.04 . 01.17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	3.784.000,00	3.784.000,00	100,00
4.05 . 4.05.08.04 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	21.045.177,00	20.900.000,00	99,31
4.05 . 4.05.08.04 . 02.22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	21.045.177,00	20.900.000,00	99,31
4.05 . 4.05.08.04 . 28	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	666.639.500,00	543.559.000,00	81,54
4.05 . 4.05.08.04 . 28.01	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	3.853.000,00	0,00	0,00
4.05 . 4.05.08.04 . 28.03	Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	351.836.000,00	258.945.000,00	73,60
4.05 . 4.05.08.04 . 28.05	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan	249.436.500,00	223.400.000,00	89,56
4.05 . 4.05.08.04 . 28.10	Kegiatan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat	61.514.000,00	61.214.000,00	99,51
<b>Jumlah</b>		8.402.610.691,69	6.859.046.949,00	81,63

Pencapaian realisasi sebesar 81.63 % ini dianggap cukup tinggi, dan optimal dalam pencapaian kinerja Kecamatan Cidadap.

Adapun Pagu dan realisasi anggaran Kecamatan Cidadap per sasaran dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.22  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Cidadap Kota Bandung persasaran Tahun 2018**

No.	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	6.040.733.829,00	5.020.045.736,00	83.10%
2.	Meningkatkannya pemberdayaan masyarakat	2.361.876.862,69	1.839.001.213,00	77.86%
	<b>Jumlah</b>	8.402.610.691,69	6.859.046.949,00	<b>81.63%</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direalisasikan sebesar Rp. 6.859.046.949,00,- dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 8.402.610.691,69,- atau **81.63%** dengan pencapaian sasaran organisasi rata rata sebesar **100.54 %**. Hal tersebut merefleksikan tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Cidadap Kota Bandung pada tahun 2018.



Dan untuk melihat Realisasi Pencapaian Misi pada Kantor Kecamatan Cidadak dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 3.23  
**Pagu dan Realisasi Misi  
Kecamatan Cidadak Kota Bandung Tahun 2018**

No	Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Mewujudkan Pelayanan Publik yang MANTAP (Melayani, Integritas dan Profesional)	1.1 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	6.040.733.829,00	5.020.045.736,00	83.10%
		1.2 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	2.361.876.862,69	1.839.001.213,00	77.86%
<b>JUMLAH</b>			<b>15.218.794.682,00</b>	<b>14.570.788.746,00</b>	<b>81.63%</b>

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kecamatan Cidadak Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.24  
**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Kecamatan Cidadak  
Kota Bandung Tahun 2018**

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Rata rata Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
<b>A.</b>	<b>Misi 1,</b>				
1	Melebihi/Melampaui Target	2	<b>100,54 %</b>	<b>14.570.788.746</b>	<b>81.63%</b>
2	Sesuai Target	0	0		
3	Tidak Mencapai Target	0	0		
4	Tidak dapat diukur	0	0		

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kecamatan Cidadap Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan sudah cukup efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

### **Analisa Efisiensi**

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaiannya kinerja mencapai atau lebih dari 100%, sebagaimana telah dipaparkan diatas.

Untuk misi 1 yaitu realisasi sebesar Rp. **14.570.788.746,-** dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. **15.218.794.682,-** atau **81.63%** dengan pencapaian sasaran organisasi rata rata sebesar **100.54 %** dari total anggaran yang dialokasikan.

Untuk efisiensi sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yaitu realisasi sebesar Rp. 5.020.045.736,00,- dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 6.040.733.829,00,- atau **83.10%** dengan pencapaian sasaran organisasi sebesar **100,54 %** dari total anggaran yang dialokasikan.

Untuk efisiensi sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat yaitu realisasi sebesar Rp. 1.839.001.213,00,- dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 2.361.876.862,69,- atau **77.86%** dengan pencapaian sasaran organisasi sebesar **103,44 %** dari total anggaran yang dialokasikan.

### **Prestasi dan Penghargaan**

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Cidadap Kota Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Kecamatan Cidadap Kota Bandung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 2 (Dua) tahun tersebut, sebagai berikut :

Tabel 3.26  
Daftar Prestasi dan Penghargaan yang diperoleh oleh  
Kecamatan Cidadap

NO	NAMA KEJUARAAN/ KEGIATAN	TINGKAT KEJUARAAN/ KEGIATAN	PRESTASI		KETERAN GAN
			TAHUN 2017	TAHUN 2018	
1	Lomba PAR	tingkat kota bandung		Juara 1	
2	UP2K	tingkat kota bandung		Juara 1	



## BAB IV

# PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2018. Pembuatan LKIP ini merupakan salah satu pertanggung jawaban tahunan, guna menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Cidadap Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2018 Kecamatan Cidadap Kota Bandung menetapkan sebanyak 2 (dua ) sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik** yaitu Untuk efisiensi sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yaitu realisasi sebesar Rp. 5.020.045.736,- dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 6.040.733.829,- atau **81.10%** dengan pencapaian sasaran organisasi sebesar **100,54 %** dari total anggaran yang dialokasikan.

**Sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat** yaitu realisasi sebesar Rp. 1.839.001.213,- dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 2.361.876.862,69,- atau **77.86%** dengan pencapaian sasaran organisasi sebesar **103,44 %** dari total anggaran yang dialokasikan. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran tersebut,

secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 85 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi *Memuaskan*. Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Cidadap Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. **14.570.788.746,-** dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. **15.3218.794.682,-** atau 81.63% -.

Dalam tahun 2018 tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. **14.570.788.746,-** (meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung) secara efektif telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kecamatan Cidadap Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cidadap Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, 18 Januari 2019

**CAMAT CIDADAP**



**H. YASA HANAFIAH, SE.,MM**

Pembina Tk 1

NIP. 19690904 199703 1 004